

# BOS SRITEX DIDUGA GARONG UANG NEGARA RP 3,58 TRILIUN

Pejabat Top Bank Jabar Banten dan Dirut Bank DKI Diseret Jadi Tersangka

JAKARTA, BN - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBB) dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya, pada Senin (2/6/2025).

Bersambung ke hal.11 kol.1



Tersangka Iwan Setiawan Lukminto.

## Kasus Dugaan Mal Praktek RS Siti Hajar ‘Mangkrak’ di Polresta Sidoarjo



Keluarga korban dugaan Malpraktek RS Siti Hajar, saat jumpa media. (Foto: ist)

SIDOARJO, BN – Penyidik atas dugaan malpraktek yang Satreskrim Polresta Sidoarjo dini- menyebabkan Bhagas Priyo (20) lai lamban dalam tangani perkara warga Spande, Candi, Sidoarjo,

Pakar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Prof. M. Sholehuddin.

Bersambung ke hal.11 kol.1

## Tim Satpol PP Magetan Sidak Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Panekan, Sukomoro dan Kawedanan



Kegiatan tim Satpol PP Magetan Sidak Gempur Rokok Ilegal selama 2 hari yaitu Rabu dan Kamis (21-22/5) di Kecamatan Panekan, Sukomoro dan Kawedanan Kabupaten Magetan. (Ashar)

MAGETAN, BN - Perjalanan Giat Sidak Gempur Rokok Ilegal selama 2 hari yaitu Rabu dan Kamis (21-22/5) khususnya hari kedua di Kecamatan Panekan, Sukomoro dan Kawedanan. Wartawan Bidik Nasional (BN) Biro Magetan Ashar AR, mengikuti Tim Sukomoro di empat desa yaitu ; Kembangan, Kedung Guwo, Bogem dan Kentangan. Tim menyusuri toko-toko dan warung-warung penjual rokok di empat desa tersebut.

Meskipun dari toko ke toko dan dari warung ke warung yang ada penjualan rokok didatangi, tidak ditemukan penjualan rokok ilegal yang TIDAK ADA PITA CUKAI nya, ROKOK POLOS, ROKOK PITA CUKAI yang dilekatkan BUKAN PADA PORSI nya dan atau pun ROKOK DENGAN PITA CUKAI BEKAS yang dilekatkan kembali ke kemasan bungkus rokok baru. Meski tidak menemukan rokok ilegal, tim tetap semangat memberikan penyuluhan pengertian dan penjelasan kepada pemilik toko dan warung yang ditemui.

Imron dari koordinator tim Satpol PP menyampaikan, resiko yang ditanggung kepada pemilik toko atau pun warung yang menerima tawaran para sales untuk menjual ROKOK ILEGAL, maka akan ditindak sesuai peraturan yang ada. Ini tentunya penjual akan rugi waktu, tenaga dan pikiran dan tentunya harus bayar denda dan hukuman jika terbukti melanggar.

“Jika kedapatan menjual rokok ilegal akan berhadapan dengan sanksi berdasarkan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku berupa sanksi perdata berupa denda beberapa kali lipat dari harga cukai hingga bisa pidana kurungan,” kata Imron.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP dan Damkar Magetan, Gunendar, mengutarakan tentang pelaksanaan operasi berpatokan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 terkait Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Lanjut Gunendar, dalam aturan baru tersebut, terdapat sekat pembatas yang harus dipatuhi, termasuk dalam hal sosialisasi dan teknis pelaksanaan operasi.

“Bentuk outdoor dalam melaksanakan Sosialisasi tidak diperkenankan lagi, akan tetapi dapat dikerjakan secara indoor. Proses yang harus dilakukan setiap akan di mulai pelaksanaan operasi Gempur Rokok Ilegal terlebih dahulu adakan pengumpulan Informasi maksimal empat kali,” ungkap Gunendar.

Selain itu, Gunendar pun mengutarakan terkait pelaksanaan operasi bersama ini harus dilaksanakan oleh tim yang legal, sesuai dengan Keputusan Bupati yang mengatur teknis pelaksanaan dan keanggotaan operasi gabungan.

“Pelaksanaan kegiatan gempur rokok ilegal baru bisa di mulai operasi pada bulan Mei, setelah keputusan bupati turun. Hari Rabu kemarin 21/5 ini dan dilanjutkan Kamis (22/5) giat operasi bersama tetap di Tiga Kecamatan akan tetapi melanjutkan bagi desa & Kelurahan yang belum tersentuh kemarin itu, yaitu Kecamatan Panekan, Sukomoro, dan Kawedanan,” ucap Gunendar pula.

Meskipun Hasil tetap nihil dalam penyusuran adanya penjualan rokok ilegal di Kecamatan Sukomoro, Panekan dan Kawedanan seperti hal nya kemarin, 3 tim dalam giat operasi bersama dalam gempur peredaran rokok ilegal tetap semangat dengan wajah ceria karena ada dua kemungkinan, pertama kesadaran para pemilik toko dan warung untuk tidak menjual rokok ilegal lagi dan yang kedua keberuntungan pemilik toko atau pun warung tidak ada saat kedapatan menjual rokok ilegal atau dengan kata lain antara resiko dan hasilnya tidak sebanding jika terjaring razia oleh tim. (Adv/Ashar)

## ANGGARAN DISPORAPAR JOMBANG PATUT DIUSUT

JOMBANG, BN - Korupsi masih terus terjadi di Indonesia kendati berbagai upaya telah dilakukan. Berbagai modus korupsi di lakukan, baik dari kalangan dunia usaha ataupun pegawai negeri. Ada beberapa modus korupsi yang paling populer dan terus berulang-ulang setiap tahunnya adalah dugaan penyalahgunaan anggaran adalah modus korupsi terbanyak di Indonesia. Kasus korupsi dengan modus anggaran kegiatan per tahun,

Bersambung ke hal.11 kol.5



Bambang Nurwijanto

## Tumplek Blek!! Ribuan Pengunjung dan Wisatawan Ramaikan Tumpeng Sewu Desa Adat Kemiren Banyuwangi



Para pengunjung tampak antusias mengikuti acara Tumpeng Sewu Desa Adat Kemiren Banyuwangi. (dj)

BANYUWANGI, BN – Tumplek blek, Ribuan orang meramaikan Tumpeng Sewu yang digelar di Desa Adat Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (29/5/2025) malam. Bukan hanya warga masyarakat sekitar, Wisatawan juga turut datang menikmati sajian menu khas suku Osing, etnis asli Banyuwangi.

Warga dan pengunjung telah memadati kanan-kiri jalan raya sejak sebelum Magrib. Mereka duduk lesehan di pinggir jalan dengan hidangan lengkap yang siap disantap.

Selepas Magrib, Festival dimulai dengan pertunjukan Barong Kemiren. Diiringi lantunan musik khas dan pembawa obor, dua barong masing-masing berjalan dari ujung lokasi Festival menuju ke Kantor Desa, pusat arena Pagelaran.

Di sela pertunjukan itu, para pembawa obor menyalakan tiap-tiap obor yang berjajar di kanan-kiri jalan.

Usainya pertunjukan menjadi pertanda bagi warga untuk mulai menyantap menu Tumpeng Sewu yang telah tersedia di lesehan masing-masing.

Mastuki, warga Kemiren, mengatakan, seluruh

warga Kemiren menyiapkan makanan besar setiap pelaksanaan Tumpeng Sewu. Salah satu menu yang wajib ada dalam hidangan ada Pecel Pitik.

Pecel Pitik adalah lauk yang berbahan utama ayam kampung panggang yang dibumbui dengan kelapa parut dan beberapa jenis bahan dapur. Menu ini adalah salah satu makanan khas Suku Osing.

“Biasanya satu keluarga tidak hanya menyiapkan satu tumpeng. Bisa tiga, empat, atau lima. Karena saat Tumpeng Sewu, mereka biasanya akan mengundang kerabatnya yang berasal dari luar Kemiren,” kata Mastuki.

Ketua Lembaga Adat Osing Kemiren Suhaimi menjelaskan, tradisi Tumpeng Sewu adalah budaya leluhur sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta.

“Dalam Tumpeng Sewu, ada beberapa tradisi yang juga digelar oleh warga, salah satunya Mepe Kasur (jemur kasus) yang dilakukan pada pagi hingga siang hari,” ujar Suhaimi.

Pada tengah malam, masyarakat melanjutkan kegiatan dengan Mocoan Lontar Yusup semalam suntuk. Lontar Yusup merupakan naskah kuno yang bercerita tentang kehidupan Nabi Yusuf.

(Adv/Dj/edy)



BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

Mengucapkan

10 DZULHIJAH 1446 H / TAHUN 2025

IMAM HIDAYAT, S.SOS., M.M.  
KEPALA BIRO KESRA JATIM

Dra Hj Khofifah Indar Parawansa MSI  
dan Dr H Emil Elestianto Dardak MSc  
GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR  
JAWA TIMUR

”  
Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga setiap tetes darah kurban membawa rahmat dan ampunan dari Allah SWT

Taqabbalallahu Minna Wa Minkum.



# Proyek Jalan Rabat Beton BKK Desa Perak, Baru Seumur Jagung Sudah Rusak



Proyek Jalan Rabat Beton BKK Desa Perak tampak sudah retak-retak. (tok)

JOMBANG, BN - Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sering kali memiliki berbagai modus.Mulai dari penyaluran tidak sesuai aturan, pemotongan dana bantuan, pembentukan kelompok fiktif, hingga

penyalah guna anggaran melalui proyek - proyek yang tidak jelas. Selain itu ditemukan praktik Mark up atau peningkatan harga yang tidak wajar. Sehingga anggaran proyek menjadi membengkak. Seperti kita

lihat pada pembangunan jalan rabat beton yang bersumber dari anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 2025 Desa Perak, Kecamatan Perak diduga terkesan dikerjakan asal alasan

Pasalnya, proyek yang bersumber dari anggaran BKK tahun 2025 senilai Rp.300.000.000,- dengan volume 360m X 3m s/d 4 M2 yang berlokasi di Dusun Perak RW 03 terkesan dikerjakan asal jadi dan diduga ada korupsi?

Dugaan ini muncul karena jalan yang baru selesai dikerjakan sudah memperlihatkan kerusakan, seperti retak, aus dan berdebu. Hasil

investigasi awak media Bidik Nasional (BN) di lapangan Selasa (20/5) pekerjaan tersebut baru seumur jagung sudah keropos

Diduga karena cetakan yang tidak rapat hal ini dapat menyebabkan pengelupasan karena pasta semen tidak dapat menempel dengan baik. Pengelupasan selimut beton (honeycomb) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk melekatnya material asing atau abrasi oleh benda padat.

Pengelupasan permukaan beton yang disebabkan oleh pengeringan atau pengerasan yang terlalu cepat,

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

# Munas VII Apeksi 2025 Resmi Dibuka, Walikota Probolinggo Dorong Kolaborasi Kota Kecil dan Menengah

SURABAYA, BN – Mu-syawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2025 resmi dibuka di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (8/5/2025), dengan suasana penuh semangat kolaborasi dan kebersamaan.

Acara bergengsi ini dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta Ketua Dewan Pengurus Apeksi EriCahyadi. Turut hadir sebagai peserta, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama jajaran, membawa semangat kota kecil untuk bersinergi dan bertukar gagasan dengan seluruh kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia.

Dalam sambutannya, Eri Cahyadi, yang juga Walikota Surabaya, menegaskan peran strategis Apeksi sebagai “rumah bersama” seluruh kota di Indonesia. Ia mendorong pemerataan pembangunan antar kota melalui solidaritas dan kesetaraan. “Kita tidakboleh merasa lebih unggul dari kota lain. Jika rumah ini menjadi surga, maka tidak akan ada kesenjangan. Inilah kekuatan kota-kota di Indonesia,” tegasnya.

Wagub Emil Dardak menambahkan, sinergi antar daerah adalah kunci utama pembangunan nasional. “Bertanding boleh, tapi akhirnya kita harus bersanding,” ujarnya.



Munas VII Apeksi di Convention Hall Grand City Surabaya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memberikan arahan strategis, menekankan pentingnya realisasi belanja daerah dan membangun sinergi kuat bersama Forkopimda. “Stabilitas politik dan sinergi antar elemen daerah adalah fondasi utama.Bangun hubungan kekeluargaan, bukan sekadar birokrasi,” pesannya.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menyambut baik forum ini sebagai ruang strategis memperjuangkan aspirasi kota-kota kecil dan menengah. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi dalam membangun inovasi dan pelayanan publik yang inklusif.

“Kami datang bukan hanya untuk belajar, tapi juga berbagi.Misalnya dalam pengelolaan koperasi Merah Putih, kami ingin menjalin kerjasama lintas kota,” tuturnya.

Munas VII Apeksi yang berlangsung hingga 10 Mei 2025 ini mengusung tema “Dari Apeksi untuk Negeri” dan diisi dengan beragam agenda, mulai dari sidang pleno, diskusi panel, Indonesia City Expo, hingga karnaval budaya.

Kegiatan pendamping seperti Youth City Changer, Ladies Program, penanaman pohon, city tour, dan panggung seni budaya semakin memperkuat nilai-nilai inklusi dan keberagaman yang diusung dalam forum ini.

(SON)

# UMKM Udeng Mapan Gelar General Meeting dan Audiensi bersama Walikota Probolinggo



PROBOLINGGO, BN – Pelaku UMKM UdengMapan (Kademangan Majudan Mapan) Kecamatan Kademangan menggelar General Meeting dan Audensi dengan Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin di Hall Puri Manggala Bakti Pemkot Pro-

bolinggo. Rabu, (21/05/2025). Berbagiproduktif dan unggul khas Kademangan seperti Strudle Tape, Pizza Tape, Aneka Cemilan, Minuman Ola-

han dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Ketua UdengMapan, Nur Hidayati, tak bisa menyembunyikan rasa harunya ketika memperkenalkan profil singkat paguyuban yang ia pimpin di hadapan Walikota dr. Aminuddin

dan para peserta. “Perjuangan kami tak mudah untuk bisa mencapai sampai detik ini.Saat ini, anggota hampir kurang lebih 200 orang dari penyaringan anggota. Jadi anggota baru wajib mengikuti bulan training selama tiga bulan sebelum masuk menjadi UMKM tetap di dalam paguyuban UdengMapan,” ucap NurHidayati.

Wanita akrab dipanggil Hidaini, menyampaikan harapannya agar program-program Pemkot Probolinggo kedepan bisa semakin mendukung UMKM, tidak hanya di Kecamatan Kademangan, tapi juga di seluruh wilayah Kota Probolinggo. “Kami ingin program-pro-

gram Bapak di lima tahun mendatang menjadi program-program yang mendukung UMKM se Kota Probolinggo, tidak hanya Kecamatan Kademangan, tapi seluruh UMKM Kota Probolinggo,” harapnya.

Gayung bersambut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin memberikan apresiasi kepada UMKM UdengMapan, dan mendukung perkembangan UMKM di Kota Probolinggo, karena Menurutnya UMKM merupakan salah satu pilar yang berkontribusi membangkitkan perekonomian Kota Probolinggo dan sesuai dengan Program Presiden Prabowo. (SON)

# Bayar Rp 7 Juta, Gugat Cerai Abdul Mu’i Warga Desa Nguter Tak Kunjung Selesai



Maskur Kaur Keuangan Merangkap Kaur Kesra Desa Nguter.



Abdul Mu’I

LUMAJANG, BN - Polemik gugat cerai antara Abdul Mu’i Bin Rai sebagai penggugat dan Anik Budiwati Bin Sumo sebagai tergugat, proses gugat cerai tersebut sudah berjalan hampir 1 Tahun 3 Bulan, namun sampai saat ini belum selesai. Bahkan Abdul Mu’i Bin Rai mengaku ditarik biaya Rp 7.000.000,- oleh Kaur Keuangan merangkap Kaur Kesra Desa Nguter Kecamatan Pasiripan bernama Maskur.

“Maskur ini merangkap dua jabatan Kaur Kesra dan Kaur Keuangan, padahal. Kaur Kesra di Desa Nguter sudah sejak lama dipegang/diurus oleh Sulikan, yang selama ini menangani gugat cerai di desa tersebut. Ada dugaan Maskur menjalankan bisnis menarik biaya yang selama ini tidak wajar dan diduga banyak korban-korban yang lain terkait dengan pengurusan gugat cerai di Desa Nguter dengan merangkap 2 jabatan sekaligus,” ujar sumber Bidik Nasional (BN).

Menurut sumber, secara umum perangkat desa dilarang merangkap jabatan, larangan tersebut bertujuan untuk menjaga fokus dan integritas perangkat desa dalam menjalankan tugasnya, sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf B, juga melarang perangkat desa merangkap jabatan, sanksi bagi perangkat desa yang merangkap jabatan dapat berupa pemberhentian sementara /pemberhentian definitif. “Dengan dasar-dasar diatas ini yang perlu dipertegas kepada Maskur Kaur Keuangan Desa Nguter, untuk bertanggung jawab dalam masalah ini,” tandas sumber itu.

Dengan dasar pengaduan Abdul Mu’i, diduga sebagai korban Maskur Tim Media BN Selasa (22/04/25) jam 10.37 WIB langsung konfirmasi ke Desa Nguter bertemu dengan Maskur. Maskur mengakui kalau merangkap 2 jabatan Kaur Keuangan dan Kaur Kesra. Ketika ditanya tentang biaya gugat cerai Abdul Mu’i, ia mengaku hanya persenan/komisioner saja, karena pengurusannya ia lewatkan pengacara. “Semua keuangan saya serahkan ke pengacara yang mengurusnya,” kilahnya.

Kamis (24/04/25) jam 13.20 WIB, tim media BN konfirmasi ke kantor pengacara kondang yang berdomisili di Kabupaten Lumajang yang disebutkan Maskur. Pengacara menjelaskan secara tegas dan profesional, bahwa saya hanya menerima Rp 4.000.000,- saja, untuk biaya surat kuasa dan pendaftaran gugatan ke Pengadilan Agama,” Kalau dibilang saya menerima Rp 7.000.000,- itu tidak benar, berarti ini mencemarkan nama baik saya, biar Abdul Mu’i melaporkan masalah ini, kalau sisa anggaran tersebut senilai Rp 3.000.000,- tidak dikembalikan oleh Maskur,” ujarnya.

Ketika ditanya belum selesainya proses tersebut, pengacara tersebut mengatakan, karena ini masih banding di Pengadilan Tinggi Surabaya dan ada permintaan dari tergugat, baru diselesaikan oleh penggugat, “saya tetap bertanggungjawab dan menyelesaikannya, meskipun biaya tidak sesuai yang disebutkan,” tegasnya. (tim)

# Wakil Bupati Bojonegoro Hadiri Jalan Sehat di Kecamatan Temayang



Wakil Bupati Bojonegoro memberikan sambutan di acara Jalan Sehat didampingi Camat Temayang dan Kades Jono di lapangan Desa Jono, Kecamatan Temayang Bojonegoro, Minggu 25/5/2025 (pri)

BOJONEGORO, BN – Dalam Rangka menyehatkan masyarakat dengan berolah raga, Pemerintah Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro menggelar Jalan Sehat dengan tema “Membangun Sehat Tanpa Narkoba” di lapangan Desa Jono, Kecamatan Temayang Bojonegoro, Minggu 25/5/2025.

Nampak masyarakat sangat antusias mengikuti jalan sehat ini. Acara jalan sehat tersebut menyedot dua ribu peserta dari

masyarakat di wilayah Kecamatan Temayang mulai dari pelajar SD, MI, Ibu-ibu PKK, perangkat desa dan Kepala Desa Kecamatan Temayang.

Jalan sehat diberangkatkan oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Acara dimulai pukul 6.30 wib dengan diawali senam bersama Wakil Bupati didampingi Camat Temayang, Moch Basuki, Kapolsek Temayang, AKP Eko suwanto, Koramil dan Kepala Desa Jono, Hj Henis Meindrawati.

Acara yang digelar di lapangan Desa Jono Kecamatan Temayang ini terpantau sangat meriah. Panitia menyediakan berbagai Hadiah para peserta jalan sehat salah satunya hadiah utama 1 sepeda motor Honda Beat.

Sementara, Kepala Desa Jono, Henis Meindrawati ketika ditemui awak media mengaku sangat senang karena masyarakat diajak berolahraga jalan sehat.

“Acara ini di pusatkan di lapangan Desa Jono, tempatnya juga strategis, warga kami juga sangat gembira apalagi acara ini dihadiri ibu Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Beliauanya ramah semua disalaminya dan masyarakat semangat sekali,” paparnya. (pri)

## BERITA MINGGUAN INVESTIGASI



## TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

Wiwantara. **BLITAR** : Budi Sastro. **PASURUAN** : Toddy Pras Hendarto, **PROBOLINGGO/LUMAJANG** : Sonny Narwani. **JEMBER** : Agus Budiono. **SITUBONDO** : Agust Chornelis (Kabiro), Hari Sulisty. **BONDOWOSO** : Rukwandanu. **BANYUWANGI** : Djoni DW (Kabiro), Surtipo, Sugeng Purnomo. **JAWA TENGAH** : **BLORA** : Mugianto (Kabiro), Tiono Indah Handayani, Ali Mustofa, Nurcahyanto. **REMBANG** : Didik Eko Sulistiwan. **WONOGIRI** : Heryanto. **SEMARANG RAYA** : Peni Kusumawati (Kabiro), Catur Prasetyo. **PEKALONGAN RAYA** : Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. **BATANG** : Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. **KENDAL** : Peni Kusumawati, Doni Kurniawan. **KUDUS** : Budi Setiawan. **GROBOGAN** : Heru Budianto. **SALATIGA** : Susilo Haryadi. **BOYOLALI** : Hendardi. **TEMANGGUNG** : Ahmad Mukhlis (Kabiro), Novan Argunanto. **JAWA BARAT** : **CILACAP** : Asep Saepudin (Kabiro), Suyatno, Carsono Adi Paulana. **MAGELANG** : Marno, ST. **BANDUNG** : Zaelan Ikhsan (Kabiro). **CIAMIS/KOTA BANJAR/PANGANDARAN** : Asep Sujana. **SUMEDANG** : Ernawan Hidayat. **SUBANG** : Tohir (Kabiro), Sumantri, Anay, Kandiawan, Ahmad Saehu. **INDRAMAYU** : Candra Shema Restullah (Kabiro), Ragil Pangestu. **DEPOK** : Harahap (Kabiro), Fajar. **BEKASI** : Abdul Rachman. **KUNINGAN** : Edwar Panata Muda. **PURWAKARTA** : Anthon Pontoh, Endin. **BOGOR** : Liswandi (Kabiro), Wardiyansyah Saputra, Firdaus. **JAKARTA/BANTEN** : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. **BALI** : Agung Wiarto. **SULAWESI SELATAN** : **SOPPENG/WAJO** : Anwar Paturusi (Kabiro). **PINRANG** : Moh Sabir (Kabiro), Subhan Hapid. **BONE** : Eddy Suspi AB. **SULAWESI UTARA** : Hilda Pusung. **MANADO** : Affandi Masloman. **KOTAMOBAGU/BMR** : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. **GORONTALO** : Riffy Tama'un. **HALMAHERA SELATAN** : Anwar Suleman. **KALIMANTAN TENGAH** : **MURUNG RAYA/BARITO UTARA** : Effendi (Kabiro). **KALIMANTAN BARAT** : Sofyan Hadi. **KETAPANG** : Sukarto. **KALIMANTAN UTARA** : Syamsudin (Kabiro). **KEPRI** : **BENGKALIS** : Agung Mulyono. **KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN** : Handoko **KEP NATUNA**: Amir Hamzah. **RIAU**: Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). **SUMATERA SELATAN** : **PALEMANG** : Sirlani. **LAHAT/MUARA ENIM** : Adi Nurahman. **PAGAR ALAM** : Marloe Tanjung. **OGAN KOMERING INGU/OKU SELATAN** : M Azhary MY, **OKU TIMUR** : Nelis Sri Wahyuni. **OKI** : Nurlis Oktari. **SUMATERA UTARA**. **KOTA MEDAN**: Muhammad Syafei Harahap. **LABUHANBATU** : M. Sukma (Kabiro). **PAKPAK BHARAT** : Tennang Tumangger (Kabiro), Dariono. **DELI SERDANG** : Heri Siswoyo. **ASAHAN** : Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Ames. **NIAS UTARA** : Hadirat Syukur Harefa. **NIAS BARAT** : Odaligo Zai. **TAPANULI SELATAN** : Amir Hamzah Nasution **SUMATERA BARAT** : **PASAMAN**: Suryadarma (Kabiro), Refdinall. **LAMPUNG** : **WAY KANAN** : Arye M Jahri. **LAMPUNG TIMUR** : Nuhyin, Mueshin, Antoni. **LAMPUNG UTARA** : Eka Saputra (Kabiro), Triyutika Sari **LAMPUNG SELATAN**: Muhammad Fahreza Khibran Wibowo. **LAMPUNG BARAT** / **PESISIR BARAT** : M. Taufik **TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT** : Indra Wijaya, Hendra Jaya. **PRINGSEWU** : Iskandar. **B. BANDAR LAMPUNG** : Suhartono Hariwibowo. **TANGGAMUS** : - **NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES** : Sutrisno (Kabiro), Simson Sitepu. **SUBULUSSALAM** : Agus Darminto Bancia (Kabiro), Imran Cibro. **ACEH SINGKIL** :Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalimah. **BIREUM** : Hendra S. **BANGKA BELITUNG**: Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. **JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT**: Joni Efendi. **NUSA TENGGARA BARAT** : **MATARAM**: Hidayatul Aini (Kabiro). **PAPUA** : Junjungan Silalahi. **LAYOUT/IT** Nur Hayati **PEMASARAN/ADMINISTRASI/KEUANGAN**: Dita Zahra Amalia. **PENERBIT** : PT Bidik Nasional Pers (BNP). **AKTE NOTARIS** : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. **SK MENKUMHAM** : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. **AKTE NOTARIS PERUBAHAN** : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. **SK MENKUMHAM PERUBAHAN** : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 **NOMOR INDIK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO**: 0220105231819. **NPWP**: 72.007.891.4-617.000. **ALAMAT** : Jl. Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. **JAKARTA** : JI. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. **BANK**: Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. **WEBSITE** : https://bidiknasional.com.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantumkan Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik **PENGADUAN HOT LINE** : 08123209649, 0877484103562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com/ bidiknasional1@gmail.com/bidiknasional2@gmail.com

**SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI**



# Bantuan DD BKK Desa Cukir Diduga Dikerjakan Pihak Ketiga, Bisa Dipidana



Pekerja diduga kuat bukan warga Desa Cukir

JOMBANG, BN – Proyek swakelola adalah proyek yang pengadaan barang dan jasanya di lakukan sendiri oleh kementerian/ lembaga/perangkat daerah atau organisasi kemasyarakatan/ kelompok masyarakat, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia barang/ jasa. Ini berarti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek dilakukan boleh pihak yang sama (swakelol

Pengertiannya, dalam proyek kontraktual pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga yang berstatus sebagai kontraktor atau penyedia jasa. Sementara itu, dalam proyek swakelola seperti yang ada di Desa Cukir, Kecamatan Diwek seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh internal lembaga/ organisasi desa sendiri. Jadi proyek swakelola dari Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) di Desa Cukir me-

bisa dipenuhi oleh pihak ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan, serta meningkatkan sumber daya manusia di lembaga/ organisasi di desa.

Proyek swakelola dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian anggaran. Pelaksanaan proyek swakelola diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 16 tahun 2018.

Seperti di Desa Diwek informasinya proyek bantuan Dana BKK diswakelokalkan, tetapi benar atau tidak, menurut informasi yang di terima Bidik Nasional (BN) diserahkan / dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum atau prosedur yang

benar. Maka bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Karena diduga adanya penyelewengan dana, penyuapan atau pemalsuan dokumen.

Sementara menurut informasi yang diterima BN, bahwa di Desa Cukir Kecamatan Diwek, dapat bantuan Dana BKK dari salah satu anggota dewan dengan anggaran Rp 200.000.000,- dengan volume 373 M diduga telah di pihak ketiga-kan ke kontraktor. Kalau semua di pihak ketigakan, sehingga ada dugaan bahwa TPK (tim pelaksana kegiatan) tidak difungsikan.

Selain itu jika proyek swakelola yang diserahkan kepada pihak ketiga dapat melanggar pidana korupsi (Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor), karena dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Untuk membuktikan kebenaran jika proyek tersebut di pihak ketigakan, Rabu (7/ 5/2025) Tim BN mendatangi lokasi proyek dan bertanya pada para pekerja. Pekerja tersebut mengatakan kalau proyek diborong oleh pak Eko, dia juga mengatakan kalau bukan warga desa Cukir, pekerja tersebut beralamat dari Desa Kepuhkajang kecamatan Perak.

Saat itu juga BN mencoba menemui kepala desa, namun kepala desa tidak ada di tempat. Kemudian BN mencoba menghubungi via seluler untuk konfirmasi.

Saat itu juga Sawung

Agus Basuki selaku Kepala Desa Cukir saat dikonfirmasi melalui seluler marah-marah dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas, sambil melontarkan kata kasar “Tulisen sakarepmu cuk”, jumat (9/5/2025).

Perkataan itu sangat menyenggung profesi seorang jurnalis padahal bertujuan untuk konfirmasi agar diberikan informasi yang benar terkait proyek Dana BKK di desa tersebut.

Jadi sebenarnya seorang Kepala Desa harusnya memahami dan menerapkan aturan sopan santun serta menghargai orang lain. Sebagai pemimpin, kepala desa berperan sebagai teladan bagi masyarakat dalam menjaga etika dan norma kesopanan yang penting untuk membangun hubungan harmonis dan menciptakan lingkungan desa yang kondusif. Sopan santun merupakan kunci menciptakan hubungan yang baik.

Kode etik kepala desa bertujuan untuk mengatur perilaku dan tindakan kepala desa agar tetap profesional, netral, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan umum, menghindari konflik serta menjunjung tinggi etika dan berinteraksi dengan masyarakat umum. Sementara Camat Diwek ketika mau dimintai tanggapan atas perilaku dan tindakan Kepala Desa Cukir tersebut tidak ada di tempat. (Tok)

# Dugaan Pungli Mirip Lingkaran Setan Marak di SMAN Kabuh



## ❑ UPT Diknas Provinsi Jatim Cabang Jombang Diduga Kecipratan Uang Haram ?

JOMBANG, BN – Di tengah persoalan keterbatasan akses, hampir semua sekolah SMAN/SMK di Kabupaten Jombang yang merupakan institusi pendidikan tempat siswa menimba ilmu dan mengasah nilai integritas, diduga masih terkontaminasi praktik Pungli (pungutan liar).

Mirisnya, sejumlah kasus Pungli di sekolah yang sudah di ketahui oleh UPT

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa timur Cabang Jombang seakan sengaja di tutupi, bahkan di biarkan. Pertanyaan nya, apakah mereka dapat bagian uang haram dari hasil pungli tersebut?.

Menurut Totok, Ketua DPD MIO (Media Independen Online) Jombang, “Pungli adalah perilaku koruptif yang perlu dilawan. Pungli di sekolah akan membuat akses pendidikan menjadi mahal. Tidak menutup kemungkinan pungli dapat mengakibatkan putusnya akses warga terhadap pendidikan. Lebih parah lagi ,pungli dan segala bentuk korupsi di sekolah dapat membuat peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa semakin akrab dengan perilaku koruptif,” ungkapnya.

Pungli, lanjut tokoh Jombang ini, merupakan tindak kejahatan yang bisa kita lawan. Siapapun bisa dan punya peran melawan pungli. Pelajari seluk beluk pungli dan dan peluang untuk melawannya.

Seperti yang diduga terjadi di SMAN Kabuh, Kabupaten Jombang. Saat itu Kepala Sekolah SMAN Kabuh Ba’i diduga sengaja menghindari ketika kedatangan Wartawan Bidik Nasional (BN) di tempat kerjanya.

Kepala SMAN Kabuh mungkin sudah paham atas kedatangan Wartawan, sehingga cepat-cepat menghindarinya. Karena takut ada sebuah pertanyaan bersifat sensitif terkait isu pungli di SMAN Kabuh.

Informasi yang di terima oleh Bidik Nasional (BN), Pungli terkait Adanya pembayaran uang gedung Rp 4 juta, selain itu masih ada lagi pungli sehingga BN pun turun langsung ke sekolah SMAN Kabuh untuk menggali informasi lebih lanjut dengan menemui Ba’i selaku kepala sekolah, namun sangat disayangkan kepala sekolah diduga sengaja menghindar.

Sementara menurut informasi yang diterima BN, bahwa selain pungli uang gedung senilai 4 jt per siswa, masih ada lagi modus pungli Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hingga pengambilan ijazah, pungli terkait ujian, surat keterangan lulus, pembelian buku, seragam dan lainnya dengan pembelian yang tidak wajar.

“Pungli di sekolah tersebut seperti lingkaran setan, karena tindakan ini menciptakan sebuah siklus yang sulit untuk di hentikan. Setiap kali pungli dilakukan, ia memperkuat persepsi bahwa praktik tersebut dianggap sah dan wajar. Sehingga mendorong lebih banyak pungli pungli yang memberatkan siswa,” kata sumber itu. (Tim)

# Kabag Umum Jombang Diduga Langgar UU KIP, Konfirmasi Media Tak Pernah Dibalas



JOMBANG, BN – Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Jombang Plt.Kabag Umum seharusnya mengedepankan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008. Undang- Undang ini mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Berbagai sumber dihimpun BN, patut dicurigai Plt Kabag Umum Yudha ada dugaan tidak menghiraukan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman, kurangnya sangsi yang tegas dan mungkin juga adanya retensi terhadap keterbukaan.

Padaحال keterbukaan Informasi Publik menjadi kewajiban sekaligus tolak ukur transparansi pemerintahan.

Dimana setiap Badan Publik, khusus nya instansi pemerintahan wajib memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai perundang – undangan yang berlaku.

Sementara menurut informasi salah seorang wartawan yang ada di Jombang, Inggin menemui Plt. Kabag Umum sulitnya minta ampun,Di telpon nggak di angkat,di Whatshaap (WA), eggak dibalas. “Ini pejabat pelayan publik apa, kok beda dengan yang dulu,” ungkapnya kepada Bidik Nasional (BN).

“Ini menunjukkan kran publik di Kabag Umum Pemkab Jombang diduga sengaja dibuntu karena takut anggaran kegiatan nya dari tahun ke tahun takut jadi bahan pertanyaan,” duga wartawan senior tersebut. (Tok)

# DPRD Gelar Sidang Paripurna Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2025-2030



Sidang Paripurna DPRD Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2025-2030. (ashar)

MAGETAN, BN - Seusai pelantikan Nanik R & Suyatni Priasmoro sebagai Bupati dan Wakil Bupati Magetan masa bakti 2025- kemarin (23/3) di kantor Gubernuran Jawa Timur. Meskipun masih ada waktu beberapa hari sesuai ketentuan tahapan pemilu yang berlaku, akhir nya pada hari Senin 26/5 di gedung Paripurna DPRD Magetan telah diadakan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Magetan masa bhakti 2025-2030 yang dihadiri Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur, jajaran Forkopimda, kepala OPD Pemprov dan Kabupaten Magetan, anggota DPRD, TNI-Polri, tokoh masyarakat, ormas, hingga media dalam rapat paripurna tersebut, ada Penyampaian Visi Misi Bupati & Wakil Bupati masa jabatan 2025-2030.

Nizhamul sebelumnya menjabat PJ Bupati Magetan menyerahkan tumpukan kepemimpinan Kabupaten Magetan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Seusai serah terima jabatan, Suratno ketua DPRD dalam pidato nya, menyampaikan bahwa berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, setelah selesai serah terima jabatan bupati, maka kewajiban bupati untuk menyampaikan visi misi di dalam rapat paripurna yang terbuka untuk umum. Dalam sambutannya Nanik mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah atas kehadiran malam ini.

Dalam rapat paripurna DPRD Magetan, Senin (26/5), keduanya menyampaikan visi-misi pembangunan lima tahun ke depan, dengan mengusung semangat Magetan Aman, Maju, dan Berkelanjutan.

Penyampaian visi misi oleh Nanik Endang R sebagai bupati masa bakti 2025-2030 ada 7 misi pembangunan yang akan dituangkan & diterapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah) 5 Tahunan.

7 misi pembangunan yang disampaikan Bupati Nanik Endang R, selain membangun SDM yang andal dan Berdaya Saing kuat, sektor pertanian pun dikembangkan dengan mendorong hilirisasi, Produk unggulan berbasis UMKM dan Koperasi memegang peranan penting dalam mempertahankan perekonomian daerah yang berkelanjutan.

“Membangun Birokrasi Pemerintah yang profesional, adaptif dan transparan juga di sentuh dalam pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan membangun wilayah



kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan.”

Bupati dalam penyampaian nya. Tidak lupa bupati dalam penyampaian bahwa, Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi

kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan dalam menurunkan pengangguran untuk itu juga perlu Membangun Infrastruktur Strategis untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Akhir kata Nanik Endang R Bupati Magetan mengutarakan dalam penyampaian nya, Membangun kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tentram berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau. (Ashar)

# Desa Kedungsumber dan Kedungsari Bojonegoro Terima Sosialisasi Program Perhutanan

BOJONEGORO, BN - Setelah menerima surat Keputusan pengelolaan perhutanan sosial dalam skema Hutan Desa (HD), dua desa di Kecamatan Temayang tepatnya desa Kedungsumber dan Kedungsari menerima sosialisasi dari Cabang Dinas Kehutanan Bojonegoro, Dirjen PSKL Jawa Timur dan BBWS pada hari Rabu (28/05/2025) di Pendopo Balai desa Kedungsumber.

Dalam sosialisasi ini para pemanfaat hutan mendengar dan mendapatkan arahan langsung dari yang punya kewenangan tentang tata cara pengelolaan perhutanan sosial baik hak dan kewajiban serta larangan – larangan yang wajib dipatuhi setiap pemanfaat lahan.

Selain pemaparan hak dan kewajiban serta larangan – larangan tersebut pemanfaat juga diharuskan memenuhi kewajiban untuk membayar PNPB kepada Pemerintah.

Kegiatan sosialisasi yang digelar melalui Daring bersama Dinas Kehutan Jawa Timur dan Dirjen PSKL Yogyakarta kali ini sangat memberikan Edukasi langsung kepada para peserta yang hadir terutama Masyarakat Pinggiran hutan yang menjadi pemanfaat pada kelola Hutan desa.

Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bojonegoro, Widodo pada Media ini menuturkan bahwa antara hak dan kewajiban serta larangan – larangan di dalamnya harus di patuhi setiap pemanfaat Hutan desa ini. “Adapun untuk mengetahui akan hal ini, Kami Cabang Dinas Kehutanan Bojonegoro akan melakukan evaluasi paling sedikit setahun sekali dalam lima tahun. Apabila para pemanfaat tidak melaksanakan kewajibannya maka hak – haknya bisa di



Sosialisasi dari Cabang Dinas Kehutanan Bojonegoro, Dirjen PSKL Jawa Timur dan BBWS pada hari Rabu (28/05/2025) di Pendopo Balai desa Kedungsumber.

cabut kembali,” ucapnya.

“Jadi pada intinya Pemerintah mempunyai maksud dan tujuan ingin mensejahterakan masyarakatnya lewat Perhutanan sosial namun jangan sampai mengubah fungsi hutan. Jadikan hutan ini lestari kembali dan manfaatkan sumber dayanya untuk mencapai kesejahteraan,” harapnya.

Sementara, Ir. Kardi Kepala Desa Kedungsumber juga menandakan bahwa, “Kita harus selalu menjaga lingkungan Kita Khususnya Wilayah Hutan yang kini menjadi Hak Kelola Hutan Desa. Mari Kita manfaatkan hutan Desa Seluas 600 hektar ini sebagai sumber menambah kesejahteraan hidup,” cetusnya.

Dikatakan, “Apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya harus kita kerjakan. Jangan ambil manfaatnya saja namun kewajibannya juga harus kita seimbangkan supaya tidak melanggar antara hak dan kewajiban. Masih banyak hal – hal yang harus Kita Kerjakan di dalam pengelolaan Kawasan hutan desa termasuk salah satunya pemasangan patok tanda batas luar dan patok pemanfaat antara yang satu dengan lainnya supaya jelas batas – batasnya. Secepatnya akan Kami lakukan itu dan apabila masih banyak yang belum kami ketahui, kami siap untuk menerima bimbingan dan arahan dari para Dinas terkait,” urainya.

Dalam sosialisasi ini dihadiri Forpincam Temayang, Dua BKPH Tretes dan Temayang, KUPT Pertanian Temayang, CDK Bojonegoro, BBWS Bojonegoro dan warga dua desa Kedungsari dan Kedungsumber sebagai Pemanfaat langsung Hutan desa di wilayahnya. (pri)



# Pemkab Sumenep Siap Optimalkan Pelayanan Umum

❑ **Bupati Sumenep Achmad, Fauzi Wongsojudo : Pemkab Sediakan Call Pusat**

SUMENEP, BN- Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka pusat pelayanan pengaduan masyarakat yang berkaitan persoalan dibawah naungan pemerintah. Seringkali terjadi kasus kebakaran, kekeringan dalam artian museum kemarau panjang dan lain-lain yang bisa pemerintah Kabupaten untuk membantu.

Kata Bupati Sumenep Achmad, Fauzi Wongsojudo Pemkab menyediakan Call Pusat untuk pelayananan masyarakat umum bisa meringankan kendala yang dihadapi kena musibah, tetapi kita harus waspada dalam bekerja didarat maupun di tengah di laut karena musibah bukan rencana manusia akan tetapi yang Maha Pencipta yang merencanakan.

Bagi aduan Call pusat harus jelas nama, alamat dan motif,



Bupati Sumenep Achmad, Fauzi Wongsojudo. (ist)

agar persiapan tim dari Pemerintah Kabupaten mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk dibawa pada yang kena musibah dan untuk Tim Damkar siap 24 jam pelayanan masyarakat yang terdampak musibah di lapangan.

Lanjut Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, Call 112 bisa menjadi solusi cepat dan efektif, agar tepat, cepat dan tanggap direspon oleh pihak yang bertugas yang berkaitan kebutuhan yang harus dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Hal diatas menjadi progrm Pemerintah Daerah melakukan bantuan layanan publik melalui teknologi informasi bentuk yang nyata, untuk masyarakat Sumenep, sehingga masyarakat tidak dibebani dalam kesulitan yang terjadi. (yus)

# Kalaksa BPBD Banyuwangi: Cuaca Ektrim, Nelayan Diminta Waspada

BANYUWANGI, BN – Utamakan visi misi penyelamatan dan pertolongan di kebencanaan, (Kalaksa) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuwangi Danang Hartanto berkomitmen fokus dalam pertolongan dan penyelamatan kebencanaan.

“Kami mengharapkan bagi para nelayan, memang saat ini kondisi cuaca cukup ekstrim, dan kita tahu semua di musim kemarau, tetapi ini masih ada hujan yang cukup ekstrim, dihimbau untuk para nelayan harus berhati-hati, terutama cuaca, kalau memang sudah angin ken-

cang, ada tanda-tanda, ada awan hitam, segera menepi” jelasnya, Senin (26/5/2025).

Dirinya menyatakan, untuk keselamatan cek kondisi kapal, kondisi muatan, berapa tonase, siapkan jaket pelampung/ lifejacket, menjaga alam dan selalu waspada kondisi.

“Untuk kebencanaan ada beberapa kegiatan, nantinya kita adakan di daerah pesisir, diluar itu kita melakukan gladi kegiatan terkait ancaman stunami, dan kami membentuk Desa Tangguh Bencana bersama BPBD Provinsi Jatim, dan kita tetap sinergitas, koordinasi de-



Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuwangi Danang Hartanto bersama wartawan BN. (ist)

ngan TNI – POLRI, Satpol-airud Polresta Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan BA-

SARNAS, dalam hal pelayanan pertolongan dan keselamatan untuk masyarakat,” cetusnya. (Dj)

# Polresta Banyuwangi Ungkap 16 Kasus Narkoba, 2 Kilogram Sabu Disita

BANYUWANGI, BN – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi, Polda Jawa Timur, kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolresta Banyuwangi, Rabu (28/5/2025), Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K, MS.i, M.H didampingi Kasat Narkoba AKP Nanang Sugiyono, S.H, M.H., mengungkapkan hasil pengungkapan kasus narkoba selama bulan Mei 2025.

Dalam periode tersebut, Sat Resnarkoba berhasil mengungkap 16 kasus dengan 17 tersangka, serta menyita berbagai jenis barang bukti narkotika. Total barang bukti yang diamankan mencakup: Sabu-sabu seberat 1.969,66 gram, Ganja sebanyak 32,53 gram, Ekstasi sebanyak 10 butir, Uang tunai Rp2.400.000, 3 unit sepeda motor, 17 unit handphone, 13 timbangan digital, yang mengindikasikan peran pelaku sebagai pengedar

Salah satu pengungkapan menonjol adalah penangkapan tersangka berinisial AS (42), warga Desa Berondalem, Kecamatan Bangorejo. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat melalui layanan “Wadul Kapolresta”.



Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K, MS.i, M.H didampingi Kasat Narkoba AKP Nanang Sugiyono, S.H, M.H., saat pers rilis pengungkapan kasus narkoba. (djoni)

tahui memperoleh barang haram tersebut dari wilayah Bekasi dan Ragunan sekitar satu minggu sebelumnya.

Kedua tersangka utama, AS dan RM, dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsidiar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Polresta Banyuwangi juga menyatakan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan secara represif, namun juga preventif. Mereka telah memetakan wilayah rawan dan terus bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi dalam edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat.

(Dj/Swd)

# SMKN 2 Trenggalek Sukses Gelar SPECTA ke-21, Tampilkan Kolaborasi Spektakuler Seni dan Inovasi

TRENGGALEK, BN - Di halaman belakang SMK Negeri 2 Trenggalek pagi ini (Senin, 2/6/25) dipenuhi gelora semangat dan kreativitas dalam Puncak Perayaan Akbar SPECTA (Spectacular Event of Creativity and Talent) ke-21. Ribuan siswa, didampingi Kepala Sekolah Drs. Masrur Hanafi, M.M., seluruh guru, staf, komite sekolah, serta tamu undangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memadati area tersebut untuk menyaksikan mahakarya kolaborasi bertema “Sinergi Performa Kreatif Talenta”.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah yang dalam sambutannya mengatakan, 21 tahun SPECTA bukan sekadar angka, melainkan bukti dedikasi, evolusi kreativitas, dan kekuatan kolaborasi. “Hari ini, kami me-



Puncak Perayaan Akbar SPECTA ke-21. (ist)

nyaksikan siswa yang tak hanya terampil, tapi juga mampu bercerita melalui karya,” ucap tersebut disambut gemuruh tepuk tangan hadirin.

Gelaran SPECTA ke-21 menghadirkan rangkaian penampilan memukau, mulai dari tarian kolosal yang mengisahkan perjalanan 21 tahun sekolah, teatrikal musik penuh makna, hingga pertunjukan seni digital karya siswa jurusan multimedia. Setiap adegan mengangkat kearifan

lokal Trenggalek dan semangat generasi muda, dibalut dengan inovasi teknologi.

Alfin Nurailiyah, siswi kelas XI Akuntansi, yang turut menari di panggung, berbagi kegembiraan “Sungguh pengalaman membanggakan bisa tampil di depan ribuan penonton!”

Heny Styowati, Ketua Panitia, mengungkapkan proses persiapan yang melibatkan seluruh elemen sekolah “Konsep dirancang selama satu

bulan, dengan latihan intensif seminggu terakhir. Hasil hari ini membuktikan bahwa gotong royong bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa.”

Tak hanya pertunjukan, bazaar kreatif hasil karya siswa juga turut memeriahkan, menampilkan potensi kewirausahaan yang dikembangkan SMK Negeri 2 Trenggalek. Suasana keakraban dan kebersamaan pun tercipta, mengukuhkan SPECTA sebagai ajang silaturahmi keluarga besar sekolah.

SPECTA ke-21 bukan sekadar hiburan, melainkan bukti nyata keunggulan SMK Negeri 2 Trenggalek dalam mencetak lulusan kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Sinergi yang tercipta hari ini menjadi pondasi untuk menapaki tahun-tahun berikutnya dengan pencapaian lebih gemilang. (nik)

# Bupati Pamekasan Serahkan Petikan SK Kepada 58 CPNS Formasi 2024



Bupati Pamekasan Drs KH. Kholilurrahman, SH, M.Si saat menyerahkan secara langsung petikan Surat Keputusan (SK) terhadap 58 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 di pendopo Ronggosukowati Pamekasan, 27/05/2024. (ist)

PAMEKASAN, BN-Bupati Pamekasan Madura Jawa Timur Drs KH. Kholilurrahman, SH, M.Si menyerahkan secara langsung petikan Surat Keputusan (SK) terhadap 58 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 di pendopo Ronggosukowati Pamekasan, 27/05/2024.

Dalam sambutannya bupati Pamekasan Drs KH.Kholilurrahman, SH,Msi menyampaikan selamat kepada para CPNS yang telah menerima Surat Keputusan (SK) yang terdiri dari untuk 34 tenaga teknis dan 24 tenaga kesehatan tersebut.

Oleh karena itu, bagi mereka yang telah menerima petikan SK sebagai calon abdi Negara, tentu dengan tugas dan amanah yang berat, “Hari ini saya bahagia, karena baru saja kita saksi bersama penyerahan petikan surat keputusan bupati pamekasan tentang pengangkatan CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah kabupaten pamekasan yang cukup lama di tunggu-tunggu,” ujarnya.

Kholil juga mengatakan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah menerima petikan SK itu merupakan orang-orang yang terpilih dari sekian ribu pelamar yang berlomba-lomba untuk menjadi abdi Negara, maka dari itu status CPNS yang di embannya menjadi kebanggaan tersendiri. “Ketika harapan saudara dikabulkan oleh Allah SWT menjadi bagian dari aparatur pemerintahan, meskipun masih dalam status CPNS, tapi inilah kesempatan yang tepat untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah,” ungkapnya.

la juga menambahkan bahwa wujud syukur itu, dapat di implementasikan dengan menjadi CPNS yang disiplin, amanah, berintegritas dan bertanggung jawab. karena tanggung jawab yang dipikulnya bukan hanya kepada diri sendiri melainkan kepada agama, bangsa dan negara. “Tanggung jawabnya sangat tinggi, apalagi nanti pangkatnya semakin tinggi, maka semampang SK CPNS baru di terima, apakah saudara-saudara sekalian sanggup menjalankan tugas dan amanah ini,” ucapnya.

Dia berharap, para CPNS yang baru saja menerima petikan SK itu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing serta tidak henti-hentinya untuk belajar agar bisa menjadi abdi negara yang kreatif, inovatif dan kolaboratif. “Dengan demikian, hambatan, rintangan dan kesakitan yang akan di hadapi saudara akan mudah mendapatkan solusi serta mampu mewujudkan apa yang kita cita-citakan,” pungkasnya. (kholis)

# Kadis Kominfo Berharap Aplikasi Smart Kampung Manfaat Untuk Masyarakat Banyuwangi



Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi Budi Santoso bersama Daud Djoni wartawan BN biro Banyuwangi. (ist)

BANYUWANGI, BN – Kementerian Kominfo dan Digital bersama jajaran Dinas Kominfo di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, melaksanakan tugas mengelola dan mengembangkan Pemerintahan di bidang teknologi informasi di seluruh jajaran wilayah Indonesia.

Seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi Budi Santoso, di tahun 2025 ini, tidak ada hal yang baru, hanya penguatan saja walaupun dari Pusat, tetap bagaimana bisa mengeluarkan layanan berbasis digital karena di era sekarang hal tersebut menjadi sebuah kekayaan.

“Kalau kita tidak mengikuti digitalisasi, dan khusus di Banyuwangi kita punya aplikasi namanya aplikasi ‘Smart Kampung’ dalam arti semua layanan untuk masyarakat sudah lengkap dan tujuannya untuk memudahkan pelayananan, masyarakat mau menngurus kependudukan, perijinan, kesehatan, pendidikan dan semuanya ada di aplikasi ‘Smart Kampung’,” jelasnya kepada BN, Rabu (21/5/2025).

Masyarakat yang domisilinya jauh di Kalibaru, Glenmore, dan Wongsorejo tidak harus datang ke kota sambung dia, cukup dengan aplikasi smart kampung, ini yang menjadi prioritas ibu Bupati, dimana Pemkab. Banyuwangi memastikan bahwa masyarakat bisa terlayani dengan mudah, cepat dan gratis.

Menurutnya, bagi masyarakat tingkat inselnya masih belum semua menggunakan aplikasi smart kampung, masih kisaran 22 persen, sekitar 250 an ribu yang menggunakan smart kampung dan bagi masyarakat yang menggunakan smart kampung, kemudahan dalam pengurusan banyak dirasakan.

“Tidak harus datang ke kantor, cukup dengan hanphone, dan kita terus berbenah, bagaimana bisa menginterigrasikan data, insyallah dalam waktu dekat ibu Bupati melaunching, dan kalau sudah terwujud lebih cepat lagi, dan beberapa OPD yang memberikan layanan bisa terlayani semua,” jelasnya. (Dj)

# Disaksikan Kapolresta, Perguruan Silat Bumi Blambangan Deklarasi Damai



Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., dan Ketua IPSI, saat menyaksikan deklarasi damai perguruan silat. (dj)

BANYUWANGI, BN – Seluruh perguruan pencak silat di Bumi Blambangan (Kabupaten Banyuwangi) mendeklarasikan komitmen damai dalam kegiatan yang digelar Polresta Banyuwangi, Selasa (27/5/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari deklarasi serentak se-

Jawa Timur yang dipimpin Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto melalui Zoom. Deklarasi berlangsung di Rupatama Polresta Banyuwangi dan dihadiri Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., Ketua IPSI, serta para ketua perguruan silat.

Para peserta menandatangani sembilan poin komitmen bersama untuk menjaga kondusifitas, menolak kekerasan, dan memperkuat sinergi dengan aparat keamanan.

Poin deklarasi mencakup larangan penggunaan atribut untuk kegiatan ilegal, komitmen tidak mengerahkan massa saat konflik, pembentukan tim siber di media sosial, hingga dukungan terhadap penegakan hukum oleh Polri. “Ini bukti semangat bersama menjaga kamtibmas dan mempererat persaudaraan antar pesilat,” kata Kapolresta Kombes Pol. Rama Samtama Putra

Kapolresta juga mengimbau agar seluruh elemen pencak silat tidak mudah terprovokasi, aktif menangkal hoaks, dan menjaga nama baik perguruan.

Polresta Banyuwangi berharap deklarasi ini menjadi langkah konkret membangun iklim damai dan positif di tengah masyarakat Banyuwangi. (Dj/Swd)



# Pemain BBM Subsidi Tegal Terkesan Kebal Hukum, Polisi Datang Barang Bukti Raib



Diduga pemain BBM subsidi ketika dikonfirmasi wartawan dan truk yang diduga digunakan mengangkut BBM dari SPBU. (dikin)

**TEGAL, BN** - Berawal dari aduan masyarakat adanya kegiatan ngangsu dan penimbunan BBM subsidi jenis solar dan Peralite. Untuk memastikan kebenarannya informasi tersebut, wartawan bidiknasional.com (bn.com) bersama wartawan dari media lainnya melakukan investigasi tepatnya di Desa Jatimulya Rt 05 Rw 04, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Kamis 22/5/2025 pukul 14.23 WIB

Pada waktu investigasi, wartawan menemukan barang bukti puluhan jerigen sudah berisikan BBM subsidi jenis Solar juga Peralite, satu unit truk warna orens

Nopol - G 1501- LP yang diduga digunakan untuk ngangsu solar di SPBU. Wartawan juga melihat ada aktivitas baru selesai nyedot solar dari tangki dipindah ke dalam Jerigen.

Saat dikonfirmasi awak media, 2 orang yang diduga pengangsu solar mengelak bahwa dirinya ngangsu solar subsidi untuk di jual ke petani. Selanjutnya tim media meninggalkan tempat yang diduga untuk menimbun dan menuju ke Polsek Surodadi dengan maksud melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dengan menunjukkan bukti dokumentasi foto dan video.

Setelah menunggu ham-

pir 1 jam pihak Polsek bersama rekan wartawan mendatangi tempat yang di adukan, namun sangat disayangkan karena lamban dalam menangani aduan masyarakat. Setibanya di lokasi barang bukti puluhan jerigen solar ternyata sudah dihilangkan, tapi masih ada barang bukti 3 jerigen pertalite dan 1 unit mobil truk yang diduga digunakan untuk ngangsu solar sudah diganti Nopol yang sebelumnya Nopol G -1501- LP diubah menjadi Nopol G-8308-LZ. Modusnya jelas mobil truk diganti plat nomor dan barcode untuk ngangsu solar SPBU.

Dua Anggota Polsek Surodadi tidak berani mengambil langkah tegas padahal jelas masih ada barang bukti pertalite 3 jerigen dan pemalsuan data nopol Truk yang diduga digunakan untuk ngangsu solar. Sangat disayangkan pihak Polsek tidak mengambil langkah tegas hanya menyarankan agar rekan rekan media melaporkan ke Polres.

Melihat kejadian tersebut, tentunya masyarakat menduga bahwa kegiatan tersebut sudah ada pengondisian dan pembiaran, ka-

rena pihak polsek tidak mengambil langkah tegas apapun.

Perlu diketahui bahwa Pemalsuan nomor polisi (nopol) atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bisa dijerat dengan beberapa pasal, yaitu Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan Pasal 480 KUHP tentang penggunaan dokumen palsu.

Pasal 263 KUHP: Menjelaskan tentang pemalsuan dokumen secara umum, termasuk pemalsuan plat nomor. Ancaman hukuman untuk pemalsuan dokumen ini adalah penjara paling lama 6 tahun.

Pasal 480 KUHP: Aturan tentang penggunaan dokumen palsu, termasuk plat nomor palsu. Menggunakan plat nomor palsu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal ini.

Pelanggaran Lalu Lintas: Penggunaan plat nomor palsu juga merupakan pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi berupa denda atau kurungan maksimal 2 bulan. Kami rekan media berharap pihak Paminal Polda Jateng segera melakukan penyelidikan terkait kinerja Polres Surodadi Kabupaten Tegal Jawa Tengah. (Dikin)

# Desa Cimenga Bangun Kemandirian Ekonomi Lewat BUMDes dan Koperasi Merah Putih



Kepala Desa Cimenga Nana Rukmana. (Ed)

**KUNINGAN, BN**- Desa Cimenga, yang terletak di Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, menjadi salah satu contoh nyata desa yang tengah bertransformasi menuju kemandirian ekonomi melalui optimalisasi potensi lokal. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Nana Rukmana, berbagai inobosan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembentukan Koperasi Merah Putih.

Dengan visi yang kuat untuk menjadikan desanya sebagai desa mandiri, Kepala Desa Cimenga mengalokasikan 20 persen dari Dana Desa secara khusus untuk mendukung usaha-usaha produktif berbasis potensi lokal. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung sektor-sektor unggulan seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayur-sayuran nabati, serta layanan jasa keuangan Brilink, yang semuanya dikelola secara profesional melalui BUMDes.

BUMDes Cimenga yang diberi nama Yuda Mandiri menjadi motor utama penggerak ekonomi desa. Dalam struktur organisasi yang solid dan transparan, BUMDes ini dipimpin oleh: Ketua: Dede Yunanda, Sekretaris: Pandu, Bendahara: Ibnu.

Dengan prinsip pengelolaan yang partisipatif, BUMDes Yuda Mandiri tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari bawah. Usaha peternakan ayam petelur, misalnya, kini mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi sumber pendapatan alternatif bagi banyak keluarga.

Sementara itu, langkah strategis lainnya diambil dengan pembentukan Koperasi Merah Putih Cimenga, sebagai wadah ekonomi rakyat yang berbasis gotong royong. Koperasi ini lahir dari semangat kebersamaan dan keinginan warga untuk memiliki lembaga ekonomi yang dikelola oleh dan untuk anggota.

Struktur pengurus Koperasi Merah Putih hasil musyawarah warga dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terdiri atas: Ketua: Ahdi, Sekretaris: Sinta, Bendahara: Ayu, Ketua Bidang Keanggotaan: H. Idik, Ketua Bidang Usaha: Kusmana.

Selain itu, dalam semangat demokrasi desa, posisi Wakil Ketua Bidang Anggota dan Wakil Ketua Bidang Umum dan Usaha juga dibentuk melalui musyawarah dan mufakat, mencerminkan semangat partisipatif dalam tata kelola koperasi.

Koperasi Merah Putih menerapkan aturan tegas berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai fondasi hukum dan etika. Keanggotaan koperasi diperkuat melalui sistem simpanan: Simpanan pokok: Rp 50.000 (satu kali), Simpanan wajib: Rp20.000 (per bulan), Simpanan Manasuka: tanpa batas.

Langkah ini menjadi landasan penting untuk menjamin keberlangsungan usaha koperasi dan menguatkan rasa memiliki di kalangan anggota.

Ketika di temui di Ruang Kerjanya Kepala Desa Cimenga Nana Rukmana menegaskan bahwa keberadaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih adalah strategi jangka panjang dalam membangun kemandirian desa. Menurutnya, desa tidak bisa terus bergantung pada bantuan, tetapi harus memiliki sistem ekonomi lokal yang tangguh dan berdaya saing.Selasa (27/5/2025).

“Kami ingin masyarakat Desa Cimenga tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku utama. BUMDes dan koperasi ini menjadi alat perjuangan ekonomi kita bersama,” tegas Nana.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah desa, semangat gotong royong warga, dan transparansi dalam pengelolaan, Desa Cimenga kini optimis menatap masa depan. Langkah-langkah konkret yang diambil ini diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dalam membangun kemandirian ekonomi dari akar rumput.

Desa Cimenga bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun jiwa wirasaha dan kebersamaan di tengah masyarakatnya. Di tengah tantangan zaman, desa ini membuktikan bahwa kunci kesejahteraan terletak pada kemandirian dan keberanian untuk berinovasi. (Ed)

# PDAM Tirta Prabawa Mukti Pangandaran Targetkan Cakupan Layanan 60 Persen

**PANGANDARAN, BN** - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabawa Mukti Pangandaran terus berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih kepada masyarakat. Saat ini, PDAM menargetkan cakupan pelayanan bisa mencapai 60 persen, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pelanggan dalam mengakses layanan.

Menurut keterangan Kasubag Umum PDAM Pangandaran, M.H. Arif, langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap air bersih, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan sektor pariwisata.

Hal tersebut diperkuat oleh Direktur PDAM Tirta prabawa Mukti Pangandaran, Agus Teguh Suryaman, S.H., S.K.H., yang menjelaskan bahwa hingga saat ini jumlah pelanggan PDAM telah mencapai 3.910 sambungan, meningkat dari sebelumnya yang hanya 2.800 sambungan.

“Terkait pengembangan Perumdam Tirta Prabawa Mukti kabupaten Pangandaran tahun 2025 kedepan kita fokus pada peningkatan layanan makanya kami pada tahun 2025 memprogram kan layanan prima, kualitas nya dijamin 24 jam kontinuitas dan terakhir keterjangkauan semuanya ini sedang kami racik dan kami olah bagaimana memberikan layanan yang prima buat konsumen dan kami sedang fokus pada peningkatan kualitas sekarang ini kami sedang finalisasi kerjasama be to be dengan pihak swasta dan pihak BUMN bekerja sama dengan kami di tahun 2025, kami



Direktur PDAM Tirta Prabawa Mukti Pangandaran, Agus Teguh Suryaman. (Foto: ist)

sedang merehabilitasi beberapa pengembang di titik yang dirasa bisa meningkatkan kualitas air bersih,” bebernya.

Targetnya kata dia, “Rencana mengembangkan di wilayah grenfil untuk pelayanan Cimerak dan Cijulang sesuai dengan RT RW adalah pengembangan kawasan industri untuk bias menyuplai mungkin investor untuk pengusaha yang akan membuka usaha di wilayah sana. Tentu air bersih sangat vital untuk kebutuhan, sehingga dengan itu semuanya distribusi untuk wilayah perkotaan, Sidamulih, Parigi, Cijulang dan Cimerak dilakukan di tahun 2025,” tegasnya.

Dengan begitu ungkap Agus sapaan nya, PDAM bisa memberi layanan yang prima dan menambah cakupan layanan, pelan pelan PDAM harus menambah cakupan layanan sehingga masyarakat makin banyak yang terlayani air bersih.

Meski demikian, layanan ke sektor perhotelan baru mencapai 30 persen. “Maka dari itu, kendalanya terletak pada sarana pendukung yang masih belum memadai untuk menjangkau semua wilayah, terutama kawasan wisata,” ujarnya.

Disampaikan, PDAM berkomitmen terus memperluas jaringan dan membenahi infrastruktur guna mendukung peningkatan layanan. “Dengan kerja sama lintas sektor, diharapkan target cakupan 60 persen dapat tercapai secara bertahap,” tutupnya.

(Asep sujana)

# Warga Dusun Sukamahi Kompak Renovasi Jembatan Secara Swadaya



Warga Dusun Sukamahi RT 02/ RW 01, Desa Sukadana, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, saat gotong royong renovasi jembatan. (Ahmad sehu)

**SUBANG, BN** - Semangat gotong royong masih hidup dan kuat di tengah masyarakat Dusun Sukamahi, RT 02 RW 01, Desa Sukadana, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Pada hari ini, warga setempat melaksanakan kegiatan renovasi jembatan yang menjadi akses vital bagi warga sekitar.

Kegiatan ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, tanpa campur tangan bantuan

pemerintah atau lembaga luar. Renovasi difokuskan pada perbaikan struktur jembatan yang mulai rusak dan membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor dan pejalan kaki.

Wakil Iwan bersama RW Andi, selaku tokoh masyarakat setempat, menyampaikan bahwa inisiatif renovasi ini muncul dari kesadaran warga akan pentingnya infrastruktur yang layak untuk mendukung

aktivitas harian.

“Kami bersama warga sepakat untuk melakukan perbaikan ini secara gotong royong. Dana dan tenaga semua murni dari masyarakat. Alhamdulillah, semangat kebersamaan ini luar biasa,” ujar Wakil Iwan.

Warga tampak antusias terlibat langsung, mulai dari proses pembongkaran jembatan lama, pemasangan rangka besi, hingga pengerjaan pengecoran. Kaum muda, orang tua, hingga para sesepuh ikut berpartisipasi, membuktikan bahwa semangat kebersamaan masih menjadi ruh kehidupan desa.

Dengan adanya perbaikan ini, masyarakat berharap jembatan dapat kembali berfungsi maksimal, aman digunakan, dan menjadi

simbol nyata dari kekompakan warga Dusun Sukamahi.

(Ahmad sehu)

# BBWS Citanduy Bangun Jalan Rabat Beton Dusun Pahonjean

**CILACAP, BN** - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) OP 2 menindaklanjuti permohonan warga dengan melaksanakan pembangunan jalan rabat beton di Dusun Pahonjean, Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses jalan warga dan mendukung kegiatan pertanian serta ekonomi masyarakat setempat.

Pembangunan jalan rabat beton terdiri dari dua bagian, yaitu: Jalan sepanjang 162 meter dengan lebar 1 meter dan ketebalan 20 cm Jalan sepanjang 20 meter dengan lebar 2,5 meter dan ketebalan 20 cm. Pelaksanaan pekerjaan ini dipercayakan kepada Yuli yang terlihat



Jalan rabat beton yang dibangun BBWS Citanduy. (asep)

warga, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Dusun Pahonjean. Terima kasih BBWS Citanduy dan pemerintah daerah desa yang telah merealisasikan pembangunan ini. (ASEP SUJANA)

# April, Pendapatan Daerah Pangandaran Naik 38,73 Persen



Penjabat Kepala Bidang BAPENDA Pangandaran, Asep Rusli. (ist)

**PANGANDARAN, BN** - Pemerintah Kabupaten Pangandaran mencatat adanya peningkatan signifikan dalam pendapatan daerah hingga bulan April 2025. Kenaikan tersebut mencapai 38,73 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penjabat Kepala Bidang BAPENDA Pangandaran, Asep Rusli, saat dikonfirmasi di kantornya pada Rabu, 28 Mei 2025, menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah per April 2025 mencapai Rp29,1 miliar. Angka ini meningkat sebesar Rp8,1 miliar dibandingkan bulan April 2024 yang tercatat sebesar Rp21 miliar. “Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam optimalisasi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak,”

ujar Asep.

Meski mencatatkan tren positif, Asep mengungkapkan bahwa dari target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp110,3 miliar, baru terealisasi sebesar 26,42 persen hingga bulan April. Untuk mengejar target tersebut, Asep menekankan pentingnya konsistensi dalam pengawasan dan pelayanan, terutama dalam pelaksanaan optimalisasi pajak daerah.

“Langkah-langkah strategis dan pengawasan yang ketat terus kami lakukan untuk memastikan pendapatan daerah dapat terus meningkat dan target akhir tahun bisa tercapai,” tambahnya.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara OPD pengelola pajak dan stakeholder terkait guna mendorong peningkatan pendapatan demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Asep sujana)



# BLK Kediri Gelar Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue 1 Untuk Warga Desa Pikatan Wonodadi Blitar



Pelatihan pembuatan roti dan kue-1 di Kantor Balai Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang digelar BLK Kediri Pelatihan diikuti 16 peserta dimulai 29 April sampai 19 Mei 2025. (ist)

**BLITAR, BN** - Balai Latihan Kerja (BLK) Kediri melalui Dwi Andayani selaku Koordinator Pelatihan di Wilayah Blitar melaksanakan

sampai 19 Mei 2025. Laily Umatul Khoiroh instruktur pelatihan pembuatan roti dan kue-1 menyampaikan, pelatihan membuat

roti dan kue bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga Desa Pikatan Wonodadi Blitar dalam pembuatan produk roti dan kue. “Program pelatihan yang diikuti 16 peserta, diberikan materi keterampilan mulai dari teknik dasar pembuatan roti dan kue, penggunaan alat, hingga pengenalan alat pembuat kue. Mulai cara membuat kue kering, kue basah dan roti,” ucap Laily. Lanjut Laily materi yang diberikan mulai cara pengolahan, plating, kemasan dan cara manajemen modal pembuatan kue. Mulai dari harga baku, biaya tenaga dan harga jual yang diperhitungkan. “Jadi semua diajarkan agar memahami harga jual dan keuntungan yang didapat dari penjualan kue, ketika nanti membuka usaha sendiri,” ujarnya.

Laily juga berharap setelah pelatihan ini mereka bisa buka usaha sendiri, terima pesanan kue dan bisa dititipkan di toko-toko agar menambah income keluarga dan membantu suami. “Peserta yang lulus pelatihan akan mendapatkan dua sertifikat dari BLK Kediri dan sertifikat dari BNSP. Sertifikat BNSP merupakan bukti kompetensi yang diakui secara nasional,” ungkapnya. Sementara, salah satu peserta Diah Ayu warga Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Blitar

mengatakan motivasi ikut pelatihan membuat kue ingin menambah pengetahuan membuat kue kekinian. “Sebelumnya, sudah bisa membuat kue tapi masih kue jadul. Jadi ingin mendapatkan ketrampilan membuat kue yang modern,” ungkapnya. (adv/red)



# BLK Kediri Gelar Pelatihan Servis Sepeda Motor Bagi Warga Desa Pikatan Wonodadi Blitar



Pelatihan servis sepeda motor sistem injeksi yang digelar BLK Kediri di Sekretariat IKA PMII Dusun Wonodadi Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu (21/5/2025). Tampak peserta sangat senang dan antusias mengikuti pelatihan, (ist)

**BLITAR, BN** - BLK Kediri melaksanakan pelatihan servis sepeda motor sistem injeksi berlangsung di Sekretariat IKA PMII Dusun Wonodadi Desa Wonodadi Kecamatan

Wonodadi Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu (21/5/2025). Peserta pelatihan servis sepeda motor diikuti 16 peserta warga Wonodadi Kabupaten Blitar.

tur Teknik Sepeda Motor (TSM) dari BLK Kediri menyampaikan untuk pelatihan servis sepeda motor bagi peserta dari Wonodadi Blitar diajarkan sesuai 17

unit kompetensi dengan dibekali untuk motor matic bagian cvd dan overfull engine konvensional serta sistem pengapian CDI. “Jadi di luar topik injeksi tetap kita bekal semua peserta di Wonodadi,” ucap Arifin. Lanjut Arifin selain itu kita bekal pengenalan komponen-komponen yang ada di sistem injeksi baik genser maupun akuator. Pengenalan cara kerja sistem injeksi dan pengenalan scanner atau diagnostik stolnya untuk motor injeksi. “Selanjutnya, untuk di Wonodadi kita bekal juga untuk overfull engine konvensional mengenai trans-

missi, kopling, pengapian, priston, mekanisme katub itu kita ajarkan. Itu yang membedakan pelatihan-pelatihan yang ada di luar,” ujarnya. Ditambahkan Arifin bahwa ketebulan ini program NPU tapi dibekali uji kompetensi. Jadi ada uji kompetensinya dari BNSP. “Nanti setelah selesai pelatihan selama 35 hari, akan ada uji kompetensi sesuai dengan skema, yaitu servis sepeda motor sistem injeksi 17 unit kompetensi yang diujikan,” imbuhnya. Arifin menuturkan setelah peserta mendapatkan pelatihan disini untuk peluang kerja ada sekitar 60

persen, ada yang buka bengkel sendiri dan melanjutkan bengkel milik orang tuanya. “Saya berharap anak-anak bisa sukses semua dan tentunya peningkatan ekonomi bisa lebih bagus,” harapnya. Sementara, salah satu peserta Burhan warga Desa Pikatan Kecamatan Wono-

dadi Blitar mengaku ikut pelatihan servis sepeda motor disini ingin menambah skillnya. “Dan rencananya ingin mengikuti kegiatan di bengkel untuk menambah ilmunya agar bisa berkembang dan membuka wirausaha sendiri,” ujar Burhan. (adv/red)



INFO DPRD KOTA BANDUNG

# Komisi IV DPRD Kota Bandung Dalam Persiapan Disdik Terkait SPMB 2025/2026



Komisi IV DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja serta monitoring lapangan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bandung Tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

**BANDUNG, BN** - Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja serta monitoring lapangan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bandung Tahun 2025, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Selasa, 27 Mei 2025.

Rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Bandung bersama Plt. Kadisdik Kota Bandung, Dani Nurahman, dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si. Acara dihadiri pula oleh para anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung yakni, Aswan Asep Wawan; Christian Julianto Budiman; Elton Agus Marjan; drg. Susi Sulastri; Drs. Heri Hermawan, M.M., M.Pd.; H. Soni Daniswara, S.E; Eko Kurnianto W, S.T., M.Pmat.; M. Syahlevi Erwin Apandi; dan M. Reza Panglima Ulung. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono menjelaskan, kegiatan monitoring lapangan dan rapat kerja tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memastikan informasi sesuai rencana dari pelaksanaan SPMB Kota Bandung Tahun Ajaran 2025/2026. “Kita ingin mendalami sejauh mana persiapan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 yang telah dilakukan Dinas Pendidikan. SPMB secara umum kita ketahui ada empat jalur, dari mulai jalur afirmasi bagi murid Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), jalur domisili, jalur prestasi, dan jalur mutasi,” ujarnya.

Iman Lestariyono mengatakan, untuk penempatan Afirmasi RMP saat ini telah memasuki tahapan penetapan hasil pemetaan dan permintaan. Para murid baru yang telah terdaftar dalam status Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi melalui jalur RMP. Untuk proses penempatan jalur afirmasi kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) jenjang SMP telah selesai. Prosesnya dimulai dari pendataan bagi calon murid yang akan ditempatkan di SMP Negeri. Kuota penempatan RMP sebanyak 20 persen telah didata berdasarkan Data Pokok Pendidikan, kemudian diverifikasi oleh sekolah asal dan divalidasi oleh sekolah tujuan. “Untuk afirmasi Kota Bandung, diawali dengan afirmasi penempatan RMP. Jadi mereka yang telah masuk dalam DTKS

didata melalui sistem untuk dilakukan penempatan afirmasi RMP di sekolah negeri terdekat, untuk memilih sekolah negeri mana, hal ini untuk mempermudah dan memberikan ketenangan bagi orang tua murid,” ucapnya. Dalam kesempatan kegiatan monitoring lapangan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bandung turut mengecek kesiapan lainnya dari pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, salah satunya kesiapan pelayanan administrasi terintegrasi, termasuk edukasi kepada calon peserta didik. Terkait kesiapan pelayanan administrasi, Dinas Pendidikan telah mendirikan meja layanan terintegrasi SPMB bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Sosial, di halaman kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung. Para petugas dari masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut memberikan pelayanan administrasi satu pintu. Iman Lestariyono menambahkan, adapun kendala yang kerap terjadi dalam proses pendataan SPMB adalah kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat untuk melakukan pembaharuan data identitas yang diperlukan. Seringkali saat waktu proses pendaftaran dibuka, kepanikan calon peserta didik terjadi untuk melakukan pembaharuan identitas. “Dengan pola pelayanan administrasi satu pintu ini memudahkan masyarakat, sehingga calon peserta didik tidak perlu bolak-balik untuk melakukan urusan administrasi sana sini. Maka secara umum, dapat kami sampaikan persiapan yang dilakukan Dinas Pendidikan sudah oke,” tuturnya. Meski demikian, Komisi IV DPRD Kota Bandung akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026. Terlebih tahapan pendaftaran untuk jalur domisili, prestasi, dan mutasi baru akan dilakukan pada 23-27 Juni 2025. Penempatan Jalur Afirmasi RMP melalui sistem sudah dilaksanakan dan sudah ada hasilnya di laman resmi spmb.bandung.go.id. Saat ini tahapan memasuki pendataan SPMB untuk semua jalur di antaranya Jalur domisili, Afirmasi, Prestasi, Mutasi yang dilaksanakan pada 19 Mei sampai 20 Juni 2025. Kemudian akan dilanjutkan untuk pendaftaran di semua jalur pada 23-27 Juni 2025. “Kita akan terus monitoring, karena proses pendaftaran secara online kan belum dimulai, kalau kick-off itu sudah untuk proses penempatannya, ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar,” katanya. (Adv/san)



**Keluarga Besar  
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri/Swasta  
se-Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik  
Mengucapkan  
Selamat Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2025**

*“Semoga Penyelenggaraan  
Pendidikan SD Negeri/Swasta Menganti Semakin Jaya”*

**Maskuri, S.Pd. (Ketua)**



# Spektakuler...!!!, 1000 Pelari Berpacu di Muara Enim Tourism Fun Run 5K

❑ Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum :  
Ini Sebagai Wujud Visi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA)

MUARA ENIM, BN - Kabupaten Muara Enim sukses menyelenggarakan kompetisi lari bertajuk Muara Enim Tourism Fun Run 5k yang dilepas dan diikuti langsung oleh Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., di Lapangan Merdeka Muara Enim, Minggu (18/05). Tak kurang 1000 pelari berpacu mengikuti ajang kompetisi lari bergengsi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ini dalam rangka meningkatkan semangat berolahraga serta kunjungan wisata ke Bumi Serasan Sekundang.

ADAPUN ajang Muara Enim Tourism Fun Run 5k diikuti para atlet hingga seluruh lapisan masyarakat yang dimulai dan diakhiri di Lapangan Merdeka Muara Enim.

Ajang ini pun semakin meriah dengan dihadirkan pembagian medali, hadiah doorprize serta senam bersama. Pada

kesempatan itu, Bupati menyampaikan Pemkab.

Muara Enim akan rutin menyelenggarakan

kegiatan olahraga yang melibatkan banyak

menuju Kabupaten Muara Enim sebagai tuan rumah

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan Tahun 2027.

Selain itu, dalam mewujudkan visi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA), kedepannya dirinya siap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga di fasilitas publik dengan memberlakukan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day. Melalui upaya ini, diharapkan kesadaran tentang gaya hidup sehat dapat ditingkatkan menuju terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif dan berkualitas di Kabupaten Muara Enim. (ADV/ADI)



Berbagai moment kegiatan kompetisi lari bertajuk Muara Enim Tourism Fun Run 5k yang digelar Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sekitar 1000 pelari berpacu mengikuti ajang kompetisi lari bergengsi ini. Tampak Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., saat melepas peserta lari dan memberi hadiah bagi pemenang di Lapangan Merdeka Muara Enim, Minggu (18/05).





# Komisi III DPRD Pinrang Gelar Rapat Bahas Aduan Warga Soal Sampah di Pekkabata

PINRANG, BN - Sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Komisi III DPRD Pinrang pada hari Rabu lalu di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampunua terkait aduan warga sekitar mengenai tumpukan sampah yang menutupi sungai. Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang pihak-pihak terkait, Senin, (26/52025), Pkl.10.00 wita, bertempat di ruang rapat Massedi Ada, Kantor DPRD Pinrang, Sulawesi Selatan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Supardi, SE didampingi Anggota Komisi III lainnya yakni, Hj. Rusnah, SE, Hasnur Asikin, Andry Muliady, S.Sos, Drs.H. Muhammad Amir, Ilham dan A. Muhammad Fahmi Fahri. Turut hadir, Plt. Kadis Perkim-LH, DR. Syamsumarlin, Dinas Perindagem, Lurah Pekkabata, Rusli, Lurah lampa, Dely, dan Ketua TPS3R Pekkabata, Hairuddin.

Dalam kata pengantarnya, Ketua Komisi III DPRD Pinrang, Supardi, SE yang juga Ketua Fraksi Gerindra menyampaikan, sesuai pantauan di lapangan, memang sampah di Pekkabata sudah sangat memprihatinkan. Bukan hanya tumpukan sampah tersebut yang sudah menutupi sungai yang bisa menyebabkan banjir, akan tetapi bau yang menyengat juga sangat mengganggu kesehatan warga sekitar dan ini bisa menjadi sumber penyakit.

Oleh karena itu, sambung Supardi, melalui RDP ini di harapkan bisa di temukan secepatnya solusi terbaik mengenai masalah sampah tersebut.

Hal senada disampaikan Hasnur Asikin, Anggota Komisi III yang juga legislator PKB dari dapil Kecamatan Duampunua-Cempa. Menurutnya, jika tumpukan sampah tersebut tidak segera di benahi, Pekkabata bisa tenggelam, apalagi saat ini musim penghujan sehingga potensi banjir itu sangat besar.

“Saya berharap keseriusan pihak terkait menangani masalah sampah ini secepatnya. Jangan sampai masalah ini berlanjut-larut tidak ada penyelesaian. Kasian masyarakat di sana, sudah bau busuk yang menyengat, juga bisa menjadi sumber penyakit bagi warga sekitar,” ungkap Hasnur Asikin.

Ilham, salah satu Anggota Komisi III yang juga legislator Partai Gerindra dapil Kecamatan Duampunua-Cempa mengungkapkan, berdasarkan informasi dari masyarakat di sana, tumpukan sampah yang ada saat ini terjadi karena



Rapat Komisi III DPRD Pinrang agenda Bahas Aduan Warga Soal Sampah di Pekkabata. (ist)

kurangnya pengawasan dari pihak terkait, karena saluran pembuang ini pernah di keruk sebelumnya, namun hanya beberapa bulan saja saluran pembuang tersebut kembali di penuhi oleh sampah. Sehingga perlu kolaborasi dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah setempat, Disperindag dan DLH agar supaya masalah sampah ini tidak selalu berulang.

Hal senada juga disampaikan H. Muhammad Amir, legislator Partai PAN dan Hj. Rusnah, legislator Partai Golkar. Mereka juga mendesak pihak-pihak terkait untuk segera menangani masalah sampah di Pekkabata.

Menurut Plt. Kadis Perkim-LH Pinrang, Samsumarlin, masalah sampah di Pekkabata baru dia ketahui setelah ada penyampaian dari Anggota DPRD Kabupaten Pinrang beberapa hari yang lalu. Sehingga dirinya berharap pemerintah setempat menjalin koordinasi dengan Dinas Perkim-LH mengenai masalah sampah di wilayahnya masing-masing supaya masalah sampah ini bisa di antisipasi secepatnya.

“Saat ini, sambung Samsumarlin, kami hanya punya 33 kontainer sampah, 5 amrol dan 9 dump truck, sehingga untuk melayani persampahan seluruh Kabupaten Pinrang kami kewalahan. Namun demikian, untuk masalah sampah di Pekkabata, asalkan pemerintah setempat mau mengangkat sampah tersebut, kami yang akan bawa ke TPA di Malimpung. Masalah sampah ini memang butuh kerjasama”, terang Syamsumarlin.

Sebelum menutup jalannya rapat, Supardi, Ketua Komisi III DPRD Pinrang membacakan kesimpulan rapat yang merupakan kesepakatan bersama yaitu: (1) untuk sampah masyarakat ditangani oleh pemerintah setempat (camat/lurah); (2) untuk sampah pasar, termasuk sampah yang ada di saluran pembuang, Disperindag dan jajarannya yang bertanggungjawab; (3) Dinas Perkim-LH agar mengangkut sampah di Pekkabata ke TPA di Malimpung setelah diangkat oleh pihak-pihak terkait; (4) paling lambat hari Rabu, Tanggal 28 Mei 2025, Komisi III DPRD Pinrang sudah menerima laporan terkait penanganan sampah di Pekkabata; (5) agar pihak pemerintah setempat (camat/lurah/desa), termasuk pengelola pasar Pekkabata, supaya mensosialisasikan ke masyarakat larangan membuang sampah di sungai. (sabir)

# Bupati Beltim Kamarudin Apresiasi Parade Drumband Jelang Kedatangan Shabrina Leanor



Bupati Beltim Kamarudin Muten bersama group drumband. (ist)

MANGGAR, BN – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) mengapresiasi lima group drumband di Kabupaten Beltim yang tampil pada parade kado Shabrina Leanor untuk masyarakat Kabupaten Beltim di Lapangan Yagor, Manggar, Jumat (30/5).

Penampilan para peserta

disaksikan oleh Bupati Beltim Kamarudin Muten, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim Dedy Wahyudi dan Ketua Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kabupaten Beltim Rosly.

“Suatu kebanggaan kegiatan ini menampilkan adik-adik pelajar dengan formasi

drumband. Ini menjadi ajang untuk memperlihatkan bakat dan kemampuan mereka,” ucapnya.

Para peserta itu berasal dari group dumberand SD 1 Manggar, SMP 1 Manggar, SMP 3 Manggar, MTs 1 Manggar dan MTs Muhammadiyah Gantung.

Menurutnya, mereka berhasil memukau penonton dengan gerakan yang sinkron, harmonis serta irama yang dinamis dan enerjik. “Kita melihat bersama penampilan menarik adik-adik ini semuanya luar biasa memainkan drumband dengan cekatan dan energik,” jelasnya.

Selain itu, penampilan semua drumband jelang kedatangan Shabrina Leanor pada Minggu,1 Juni 2025

adalah bentuk hiburan yang meriah dan menarik bagi masyarakat Beltim.

Begitu juga yang disampaikan Ketua PDBI Kabupaten Beltim Kamarudin Rosly, ia berharap dengan adanya penampilan semua drumband ini akan memberikan spirit dan support bagi drumband di Kabupaten Beltim sehingga mencapai prestasi yang gemilang.

“Penampilan semua drumband selain dapat menjadi wadah untuk mengembangkan dan memajukan bakat dan kreativitas di bidang seni musik, juga menjadi sarana penggalan bibit-bibit atlet drumband yang berpotensi dan berprestasi,” kata Rosly.

(diskominfobelitim/as)

# Tanpa Anggaran, Gelaran Turnamen Sepak Bola Mini Sukses



Andi saat menyerahkan trophy bergilir. (ist)

MANGGAR, BN – Seru dan bersemangat, kondisi ini menggambarkan suasana Pertandingan Final Turnamen Sepak Bola Mini U-12 Tingkat Kabupaten Belitung Timur di Stadion Rimba Pelawan Kecamatan Damar, Rabu (28/5/25) Sore. Meski di bawah guyuran hujan, baik

main dan penonton antusias ikut dalam turnamen ini.

Dalam pertandingan final ini, berhadapan Tim Sepak Bola SD Negeri 19 Gantung dengan Tim asal SD Negeri 10 Kelapa Kampit. Hasilnya, SD N 19 Gantung menang 2-0 atas SD N 10 Kelapa Kampit.

Kemenangan ini disambut sorak-sorai, pemain dan para penonton yang mayoritas ibu-ibu. Beberapa pemain tampak sujud syukur, beberapa bahkan ada yang meneteskan air matanya.

Ketua Penyelenggara Turnamen Sepak Bola Mini, Andi Ardian mengungkapkan turnamen ini baru pertama kali digelar. Namun antusiasme peserta dan sekolah cukup tinggi untuk ikut dalam turnamen ini.

“Biasanya hanya sampai tingkat kecamatan, tahun ini baru pertama kita gelar untuk tingkat kabupaten. Semangat anak-anak untuk tanding sangat tinggi, bahkan yang dari sekolah pelosok, tak mau

ketinggalan,” ungkap Ardian.

Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SD Negeri 2 Manggar ini menyatakan hanya 16 tim yang bertanding di tingkat Kabupaten. 16 tim tersebut merupakan pemenang dari tiap-tiap kecamatan. Hanya Kecamatan Simpang Renggang yang tidak mengirimkan wakilnya.

Tiap kecamatan kita ambil tiga tim terbaik, khusus untuk Kecamatan Simpang Pesak dan Damar hanya dua tim yang masuk. 16 tim kita bagi dalam empat grup, di mana setiap tim dapat bermain minimal tiga kali,” terang Ardian.

(diskominfobelitim/as)

# Silaturahmi Pemkab Beltim Dengan Wartawan Penuh Keakraban



Bupati Beltim didampingi Wakil Bupati, Khairil Anwar beserta Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja. Kepala Diskominfo SP, Bayu Priyambodi menjadi moderator dalam Silaturahmi dengan jurnalis dan wartawan di Kabupaten Beltim. (ist)

DPRD Beltim Fezzi Uktolseja. Kepala Diskominfo SP, Bayu Priyambodi menjadi moderator dalam kegiatan yang berlangsung selama empat jam ini.

Suasana silaturahmi berjalan santai dan penuh keakraban. Sebelum sesi dialog dan tanya jawab, para wartawan dijamu makan malam. Setelah itu, sambil menikmati penganan dan minuman ringan, para wartawan mulai mengajukan pertanyaan dan saran kepada pemerintah. Tercatat 18 wartawan yang mengutarakan pertanyaan dan uneg-unegnya.

Pertanyaan seputar program kerja Pemkab Beltim. Namun ada pula yang meminta bantuan sarana dan kegiatan penunjang kemudahan wartawan saat melakukan liputan.

Semua pertanyaan dan permintaan ditanggapi langsung oleh Bupati Beltim, Kamarudin Muten. Wakil Bupati dan Ketua DPRD juga ikut menanggapi sesuai porsinya masing-masing.

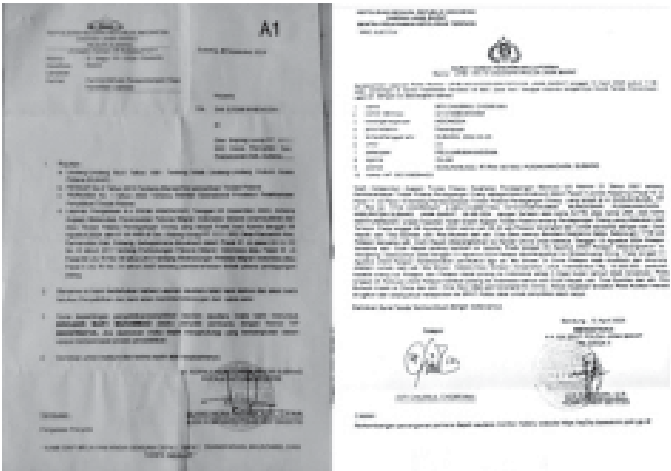
Bupati Beltim mengatakan kegiatan silaturahmi seperti harus rutin dilaksanakan, layaknya tiga atau empat bulan sekali. Afa, sapaan Kamarudin ingin agar wartawan dapat membantu menyebarluaskan program-program pembangunan.

“Tolong tulis berita yang benar, saya siap dikonfirmasi. Jangan sampai ada pemberitaan yang mendeskreditkan dan cenderung menjadi fitnah. Hal ini tidak baik bagi iklim investasi serta membuat buruk citra kita di luar daerah,” pinta Afa.

Bagi Afa, wartawan dan media merupakan rekan strategis pemerintah, di mana harus diberikan ruang sebagai kontrol sosial. Untuk itu, Dia mempersilahkan untuk melaporkan jika ada temuan di lapangan baik terkait pelayanan pemerintah maupun oknum ASN yang tidak baik.

“Khusus untuk wartawan saya berikan sayembara, jika ada ASN yang pakai baju dinas di jam kerja berada di warung kopi, fotonya kirim ke saya. Saya kasih Rp 500 ribu,” ujar Afa yang disambut tepuk tangan riuh para wartawan. (Diskominfobelitim/as)

# Polda Jabar Usut Kasus Dugaan TPPO di Subang, Pelaku Janjikan Pekerjaan ke Tiongkok



SUBANG, BN – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) tengah melakukan penyelidikan intensif terkait laporan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Subang. Kasus ini mencuat setelah laporan resmi disampaikan oleh mahasiswa asal Subang, Siti Chusnul Choiriyah, pada 10 April 2025 di SPKT Polda Jabar dengan nomor laporan LP/B/145/IV/2025/SPKT/POLDA JABAR.

Menurut keterangan dalam laporan, dugaan kasus ini bermula pada 08 Agustus 2024 di Dusun Bugel, RT 07 RW 02, Desa Pusakanagara, Kecamatan Mundusari, Kabupaten Subang. Dalam laporannya, pelapor mengungkap bahwa ada praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dengan modus menjanjikan pekerjaan di luar negeri, khususnya ke Tiongkok. Pelaku, yang diketahui bernama Wahyuningsih, diduga telah mengelabui korban dengan janji keberangkatan yang sebenarnya bernuansa eksploitasi.

Korban dalam kasus ini, Cicih Hayati, diduga diberangkatkan ke Beijing dan kemudian dipindahkan ke Shijiazhuang tanpa kepastian terkait penempatan pekerjaan yang telah dijanjikan. Lebih jauh, pihak keluarga korban juga mendapatkan janji kompensasi sebesar Rp15 juta, namun kompensasi tersebut tak pernah terealisasi. Ditambah lagi, dalam proses keberangkatan korban, terduga terjadi pemalsuan dokumen dan manipulasi identitas guna memfasilitasi tindakan ilegal tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jabar telah menerbitkan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) dan segera melakukan rangkaian penyelidikan. Sejumlah saksi, termasuk pelapor, telah dimintai keterangan untuk mengungkap rentetan peristiwa ini. Penyidik dari Reskrim Polda Jabar ditugaskan secara khusus untuk mengusut tuntas kasus ini guna mempercepat proses penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Adi Supadi, perwakilan keluarga korban, menyampaikan harapannya agar proses penyidikan segera menghasilkan keadilan. “Kami hanya ingin keadilan bagi keluarga kami. Kasus ini bukan yang pertama, dan kami percaya pihak Polda Jabar akan bersikap tegas dalam mengungkap pelaku di balik perdagangan orang yang menyengsarakan ini,” ujarnya. (M.Tohir/Tim)

# Direktur PDAM Bone Bachtiar Sairing Bertekad Maksimalkan Pelayanan Kepada Pelanggan



Wabup Bone Andi Akmal Pasluddin didampingi Kepala Bagian Prorokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bone, Andi Resky Pratama saat mengunjungi kantor PDAM Bone, di jalan Gunung Jaya Wijaya Watampone, Senin (2/6/2025). Kunjungan disambut Direktur PDAM Wae Manurung Muh. Bachtiar Sairing. (Edys)

bup) Andi Akmal Pasluddin didampingi Kepala Bagian Prorokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bone, Andi Resky Pratama saat mengunjungi kantor PDAM Bone, di jalan Gunung Jaya Wijaya Watampone, Senin (2/6/2025).

Kunjungan ini untuk merespon adanya informasi dari pelanggan PDAM Bone yang mengeluhkan pelayanan air ledeng yang sering macet serta kualitas air yang kurang memuaskan.

Direktur PDAM Wae Manurung Muh. Bachtiar Sairing, menjelaskan penyebab suplai air yang tidak lancar disebabkan banyaknya pipa PDAM yang sudah tua.

Menurut Bachtiar, pipa distribusi PDAM rata – rata telah berusia lebih dari 50 tahun sehingga sering mengalami kebocoran. “Banyak pipa yang sudah tua, sehingga rawan

BONE, BN - Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Wae Manurung Kabupaten Bone Bachtiar Sairing, S.Sos, diminta untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah Bone serta memaksimalkan pelayanan kepada para pelanggan.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bone (Wa-

bup) Andi Akmal Pasluddin didampingi Kepala Bagian Prorokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bone, Andi Resky Pratama saat mengunjungi kantor PDAM Bone, di jalan Gunung Jaya Wijaya Watampone, Senin (2/6/2025).

Kunjungan ini untuk merespon adanya informasi dari pelanggan PDAM Bone yang mengeluhkan pelayanan air ledeng yang sering macet serta kualitas air yang kurang memuaskan.

Direktur PDAM Wae Manurung Muh. Bachtiar Sairing, menjelaskan penyebab suplai air yang tidak lancar disebabkan banyaknya pipa PDAM yang sudah tua.

Menurut Bachtiar, pipa distribusi PDAM rata – rata telah berusia lebih dari 50 tahun sehingga sering mengalami kebocoran. “Banyak pipa yang sudah tua, sehingga rawan

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



# Cegah dan Tekan Stunting di Kecamatan Balik Bukit, DPC IPEKB Lambar Gelar Lokakarya Mini

LAMPUNG BARAT, BN - Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Stunting diukur berdasarkan tinggi badan anak dibandingkan dengan usianya. Anak yang tingginya berada di bawah batas ambang untuk usianya dianggap mengalami stunting dan akibatnya pertumbuhan sang anak mengalami keterlambatan atau terhambat.

Hal itu disampaikan Ketua DPC Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPEKB) Indonesia Kabupaten Lampung Barat periode 2024-2028 Arin Fatmawati, S.I.kom dalam kegiatan Lokakarya mini yang di ikuti unsur pimpinan kecamatan (Uspika) Kecamatan Balik Bukit yang dipusatkan di Kantor Penyuluh KB Kecamatan Balik Bukit di Lingkungan Pantau Kelurahan Pasar Liwa Balik Bukit, Selasa 3/6/2025.

Dalam kesempatan itu juga Ia mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan pemeriksaan kesehatan rutin ke posyandu bagi anak-anak dan ibu hamil.

“Karena posyandu adalah UKBM dan puskesmas sebagai fasilitator sehingga diharapkan dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan lintas sektor terkait,” ujarnya.

Terusnya, Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan pertama maka Puskesmas harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjangkau masyarakat secara luas, “Saya berharap Puskesmas dapat meningkatkan



Kegiatan Lokakarya diikuti unsur pimpinan Kecamatan Balik Bukit yang dipusatkan di Kantor Penyuluh KB Kecamatan Balik Bukit di Lingkungan Pantau Kelurahan Pasar Liwa Balik Bukit, Selasa 3/6/2025. (taufik)

rum ini untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi yang telah kita temui dalam pelaksanaan program kesehatan,” tandasnya.

Lokakarya itu dihadiri Sekretaris Kecamatan Balik Bukit, Yosta Sandi mewakili Camat M. Yones, Kepala Pukesmas Balik Bukit, Harjunadi dengan mengusung materi tentang Stunting dan pencegahannya

Pemateri 2. Nafisah, S.Sos.I Penyuluh Agama Islama KUA Balik Bukit membahas tentang program bimbingan perkawinan

Kapolsek Balik Bukit yang diwakili Bhabinkamtibmas Kelurahan Way Mengaku, Danramil Balik Bukit yang diwakili Babinsa Kelurahan Pasar Liwa, perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balik Bukit yang diwakili Nafisah, S.Sos.I Penyuluh Agama Islama membahas tentang program bimbingan perkawinan serta para penyuluh KB Kecamatan Balik Bukit.

Dalam kegiatan Lokakarya itu peserta fokus membahas berkaitan dengan penurunan angka stunting di Kecamatan Balik Bukit, dengan cara menyamakan langkah dan gerak untuk tujuan yang sama yakni penurunan angka stunting di Kecamatan Balik Bukit. (Taufik)

kapasitasnya dalam menangani masalah kesehatan, termasuk stunting, melalui program-program yang terintegrasi dan berbasis data,” kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program yang kita jalankan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Mari kita gunakan forum ini untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi yang telah kita temui dalam pelaksanaan program kesehatan,” tandasnya.

Lokakarya itu dihadiri Sekretaris Kecamatan Balik Bukit, Yosta Sandi mewakili Camat M. Yones, Kepala Pukesmas Balik Bukit, Harjunadi dengan mengusung materi tentang Stunting dan pencegahannya

Pemateri 2. Nafisah, S.Sos.I Penyuluh Agama Islama KUA Balik Bukit membahas tentang program bimbingan perkawinan

Kapolsek Balik Bukit yang diwakili Bhabinkamtibmas Kelurahan Way Mengaku, Danramil Balik Bukit yang diwakili Babinsa Kelurahan Pasar Liwa, perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balik Bukit yang diwakili Nafisah, S.Sos.I Penyuluh Agama Islama membahas tentang program bimbingan perkawinan serta para penyuluh KB Kecamatan Balik Bukit.

Dalam kegiatan Lokakarya itu peserta fokus membahas berkaitan dengan penurunan angka stunting di Kecamatan Balik Bukit, dengan cara menyamakan langkah dan gerak untuk tujuan yang sama yakni penurunan angka stunting di Kecamatan Balik Bukit. (Taufik)

# Disdukcapil Kuningan Tunjukkan Kinerja Prima, Pelayanan Cepat Pada Masyarakat dengan Sepenuh Hati

KUNINGAN, BN - Pelayanan publik yang prima menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan, yang belakangan ini menuai pujian atas respons cepat dan kesigapan dalam memberikan layanan administrasi kependudukan.

Dengan moto Disdukcapil Kuningan “DUKCAPIL BISA” !!! (BERKARYA, INOVATIF DAN INISIATIF, SABAR DAN SEMANGAT, ADAPTIF DAN AMANAH). Terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanannya. Mulai dari pengurusan KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran hingga pencatatan kematian,semuanya kini dapat diakses dengan lebih mudah, transparan, dan efisien. Kehadiran layanan digital, hingga pelayanan ramah difabel menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Helmi Johar, S.Sos., Disdukcapil Kuningan, mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas layanan merupakan hasil dari kerja sama tim, evaluasi berkala, serta dukungan dari masyarakat



Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Helmi Johar, S.Sos.

yang aktif memberikan masukan. “Kami berupaya hadir sebagai pelayan publik yang humanis, cepat, dan solutif. Kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Apresiasi terhadap kinerja Disdukcapil ini pun datang dari berbagai kalangan. Salah satunya dari tokoh masyarakat sekaligus pentolan Gerakan Anti Maksiat (Gamas), Moriz, yang secara terbuka menyampaikan rasa bangganya terhadap perubahan positif yang terjadi.

“Saya melihat sendiri bagaimana masyarakat kini merasa lebih mudah mengakses layanan kependudukan. Tidak ada lagi keluhan berlarut-larut,

dan ini menandakan perubahan yang signifikan. Disdukcapil Kuningan layak dijadikan contoh oleh daerah lain,” ungkap Moriz di sela sela Aktivitas nya, Selasa (3/6/2025).

Lebih lanjut, Moriz menilai bahwa sinergi antara teknologi, sumber daya manusia yang kompeten, serta kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi di tubuh Disdukcapil. Ia pun berharap agar capaian ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan dan berintegritas. (Ed)

# Sebanyak 20 KPM di Pekon Bumijaya Lambar Terima Blt DD, Ini Harapan Camat Sukau



Pj Peratin Ali Irawan saat memberikan bantuan BLT DD. (taufik)

LAMPUNG BARAT, BN - Pemerintah Pekon (Desa) Bumi Jaya Kecamatan Sukau Lampung Barat melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2025. Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa yang dibagikan kepada 20 Keluarga yang masuk dalam Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tersebut sebesar Rp.

1.200.000,00 (Satujuta Duaratus Ribu Rupiah) setiap KPM untuk bulan Januari sampai dengan bulan April 2025. Kegiatan itu dipusatkan di aula kantor Peratin setempat, Rabu 23/5/2025.

Penjabat (Pj) Peratin (Kepala Desa) setempat, Ali Irawan dalam kesempatan itu menyampaikan penetapan ke 20 keluarga yang masuk dalam KPM tersebut telah melalui berbagai proses dan

investigasi di lapangan yang melibatkan para Kepala Pemangku (Kadus) dan aparat pemerintah Pekon lainnya serta mendengarkan masukan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP).

Dalam kesempatan itu juga Ali Irawan menjelaskan dimana dari hasil verifikasi dan validasi sesuai kriteria yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Desa Tertinggal (PDDT) dan juga Peraturan Menteri Keuangan hanya 20 KPM yang benar - benar memenuhi kriteria dan disesuaikan dengan kuota anggaran.

Dalam kesempatan itu juga Ali Irawan berpesan kepada seluruh KPM untuk memanfaatkan bantuan dari pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya dan kedepannya ada peningkatan

kesejahteraan.

“Kami berharap bantuan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan juga dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat di Pekon Bumi Jaya ,” pesan sang Peratin.

Pemerintah Pekon Bumi Jaya juga selalu berkomitmen untuk terus melakukan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan, tutup Ali Irawan.

Sementara Camat Kecamatan Sukau, Juremi Yudi dalam arahnya menjelaskan bahwa pembagian BLT Dana Desa bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2025 ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat. (Taufik)

# Serahkan Bantuan Pada KPM, Peratin Rahmadi Minta Warga Gunakan Sesuai Kebutuhan



Peratin Rahmadi saat menyerahkan BLT DD. (taufik)

LAMPUNG BARAT, BN – Pemerintah Pekon (Desa) Heniarong di Kecamatan Luambok Seminung Kabupaten Lampung Barat melaksanakan distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap pertama di Balai Pekon (Desa) setempat beberapa waktu yang lalu.

Dalam acara penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut, dihadiri Camat LumbokSeminung Erwin Ardiansyah Adiguna yang diwakili sekretaris Kecamatan, Peratin (Kepala Desa), Ketua LHP

beserta anggota, Pendamping Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas Pekon setempat. Di Pekon (Desa) Heniarong, sesuai dengan ketentuan kriteria warga yang berhak mendapatkan bantuan uang yang bersumber dari Dana Desa tersebut terdapat 25 kepala keluarga yang tergabung dalam Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Dalam kesempatan itu Peratin (Kepala Desa) Rahmadi antara lain menjelaskan untuk tahap ini pemerintahan Pekon baru bisa merealisasikan BLT DD untuk bulan Januari sampai dengan Maret, yakni setiap KPM akan menerima Rp .900.000, (Sembilan ratus ribu Rupiah). Pada kesempatan tersebut, Peratin juga berharap agar bantuan yang diterima dapat digunakan sebaik mungkin demi peningkatan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat. “Saya berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Sementara Camat Kecamatan Lumbok Seminung, Erwin Ardiansyah Adiguna melalui Sekretaris Kecamatan dalam arahnya menjelaskan bahwa pembagian BLT Dana Desa bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2025 ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat.

“Kami berharap bantuan ini dapat digunakan dengan bijak oleh keluarga penerima manfaat untuk kebutuhan sehari-hari dan jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat,” ujarnya. BLT DD merupakan program prioritas nasional, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan langkah nyata Pemerintah Pekon Bumi Jaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terang Erwin Ardiansyah seperti yang dituturkan Sekcam. (Taufik)

# Ditjen KSDAE dan BBTNBBBS Dukung Upaya Pemkab Pesibar Buka Keterisoliran Way Haru



PESISIR BARAT, BN - Secara bertahap upaya keras Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan memperjuangkan untuk membuka keterisoliran dan memberikan kemerdekaan terhadap hampir 6000 jiwa masyarakat di Empat Pekon (Desa) wilayah Way Haru Kecamatan Bangkunat mulai membuahkan hasil nyata.

Hal itu disampaikan Bupati, Dedi Irawan dalam rapat koordinasi terkait upaya pembangunan jembatan, peningkatan badan jalan, dan jalur listrik menuju Way Haru yang dihadiri juga Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., serta diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di ruang rapat Bupati Lantai 4 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Rabu 28/5/2025.

Bupati, Dedi Irawan mengungkapkan Surat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Nomor: S.223/T.7/BIDTEK/KSA/B/05/2025 dan Memorandum Direktorat Jenderal (Ditjen). Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Nomor: M.49/KK/KSA.02/5/2025 kepada Kepala BBTNBBBS menjelaskan bahwa Pertama, pengerjaan perbaikan jembatan gantung Way Pemerihan dapat segera dilakukan, dengan catatan pengawasan dilakukan secara bersama oleh para pihak terkait. Kedua, terhadap pengerjaan ruas jalan- jalan patroli sepanjang kurang lebih 10 KM serta pembangunan jembatan baru lainnya dapat diakomodir dari skema kerjasama sesuai Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 85 Tahun 2014 jo. Permen LHK Nomor 44 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. (Rilis/ TAUFIK)

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**  
Jln. H.T. Rizal Nudin Km. 7 Kompleks Perkantoran Pal IV Pijor Keling  
Kota Padang Sidempuan 22733, Telp. Fax. (0634) 28941, email : kantah\_psp@yahoo.co.id

**PENGUMUMAN  
(Tentang Sertipikat Hilang)  
Nomor : 5 /2025**

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat ( 2 ), Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	NAMA/ ALAMAT PEMOHON	HAK ATAS TANAH, JENIS DAN NO. HAK	NIB	TERDAFTAR ATAS NAMA	TANGGAL PENGUMUAN	LETAK TANAH : a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan d. Kota e. Luas	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nama : Andy Novrianto Simamora Alamat : JLMT Haryono Simamora Gg.Sekolah, RT/RW 003, Kel. Bincar, Kec. Padangsidimpua n Utara, Kota Padangsidimpua n	Hak Milik No. 00662/ Wek I	00313	Muhammad Akhir Simamora	11-06-2013	a. - b. Wek I c. Padangsidimpuan Utara d. Padangsidimpuan e. 108 M²	- Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/02/I 1/2025/SPK T/POLRES PADANGSID IMPUAN/PO LDA SUMATERA UTARA tgl 27-02-2025 - Surat Pernyataan di Bawah Sumpah tanggal 23 April 2025

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Padangsidimpuan, 23 April 2025  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Padangsidimpuan

Peratin Edidares Sagala, S.Sit., S.H.  
NIP. 19780914 199703 1 001

Dipindai dengan CamScanner



# 100 Hari Kepemimpinan SUKSES di Soppeng, Kebijakan Pro Rakyat Digenjot



Refleksi 100 Hari Kepemimpinan SUKSES di Soppeng.

SOPPENG, BN - Jumat, 30 Mei 2025, hari ini, duet Bupati sah Wakil Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE - Ir. Selle KS Dalle, telah memimpin KabSoppeng selama 100 hari. Sejak dilantik di Istana Negara pada tanggal 20 Februari 2025, keduanya ternyata telah banyak menelurkan kebijakan pro rakyat yang sebagian diantaranya adalah janji kampanye. Meski pasangan ini sebenarnya tak pernah mematok hasil kerja di 100 hari pertama memimpin. Berikut sejumlah kebijakan yang dilakukan Pasangan SUKSES dalam 100 hari kepemimpinannya:

**1. Kenaikan TPP ASN**  
Sejatinya, kenaikan TPP ASN bukanlah program andalan dari pasangan ini. Meski kerap disampaikan dalam berbagai kegiatan kampanye Pilkada, namun dalam visi misi dan Program kerja keduanya, kenaikan TPP tak dibahasakan dengan detail. “Tetapi, saya memutuskan memberikan kenaikan TPP untuk memacu motivasi kerja para ASN. Di awal memimpin ini, kami membutuhkan motivasi ASN untuk membantu kami melaksanakan semua program kerja,” kata Suwardi.

**2. Seragam, Sepatu dan Tas Gratis**  
Pasangan SUKSES memastikan pelaksanaan program seragam, sepatu dan tas gratis akan digelar pada tahun 2025 ini, tepatnya memasuki tahun ajaran baru 2025 - 2026. Meski mengalami pemangkasan anggaran dalam APBD, keduanya tak surut untuk mengeliat program ini. “Kami tetap komitmen untuk melaksanakan program seragam, sepatu dan tas gratis, tahun ini juga. Meski kita tahu pusat melakukan pemangkasan anggaran,” kata Suwardi. Dana diambil dari hasil efi-

siensi yang dilakukan keduanya begitu dilantik, seperti mengurangi perjalanan dinas, menekan biaya makan, minum dan ATK serta membatalkan sejumlah program yang tak perlu.

**3. Listrik Masuk Sawah**  
Program Listrik Masuk Sawah adalah program andalan dalam kampanye SUKSES. Hal itu membuat program ini langsung menjadi sasaran utama keduanya. Berkali-kali keduanya melakukan pertemuan dengan pihak PLN dan hasilnya untuk tahun 2025 ini, telah ada sekira 23 titik yang akan dibuat.

**4. Rehabilitasi Sekolah dan Puskesmas**  
Hampir semua dana untuk infrastruktur pendidikan terkena recofussing oleh pemerintah pusat. Akibatnya, Soppeng sama sekali tak mendapat dana infrastruktur pendidikan. Namun, Suwardi - Selle, punya cara lain untuk mengatasi itu. “Makin banyak bangunan sekolah yang rusak. Kita tak boleh menyerah dengan adanya pemangkasan anggaran,” ujar Suwardi. Dalam pergeseran terbatas APBD 2025, tak kurang dari 19 sekolah yang mengalami kerusakan bangunan akan tetap diperbaiki. Sementara itu, ada 3 puskesmas pembantu yang dipastikan dibangun pada tahun 2025 ini. Dananya diambil dari hasil pemangkasan internal yang dilakukan oleh Suwardi - Selle, terhadap APBD 2025 yang tersisa.

**5. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**  
Dana DAK Fisik Jalan 2025, adalah program yang ikut terpangkas pemerintah pusat. Namun, SUKSES berkomitmen tetap membangun jalan dan jembatan sebelum tahun 2025 berakhir. Salah satunya, jalan utama

menuju Desa Leworeng yang sudah lama mengalami kerusakan dan jalan lingkar di Kecamatan Lilirilau. Selain itu, tetap melanjutkan program pembangunan jembatan di Salokaraja dan Kessing, yang dipastikan akan selesai sebelum 2025 berakhir.

**6. Pembangunan Sekolah Rakyat**  
Tak semua daerah mendapat jatah Pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Pemerintah pusat hanya akan membangun 100 lokasi tahun 2025 ini. Namun, Soppeng sukses memperoleh kepercayaan pemerintah pusat menjadi salah satu lokasi. Soppeng bersama Bone dan Makassar sukses meraih kepercayaan Kementerian Sosial karena kesiapan mereka. Suwardi - Selle bertemu dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, pertengahan Mei ini dan langsung memaparkan proposal kesiapan mereka. Bahkan, Soppeng menjadi daerah tercepat dalam menentukan lokasi sementara seperti yang dipersyaratkan Kemensos sebelum bangunan baru dibuat. Lokasi sementara SR Soppeng menggunakan bekas Rumah Sakit Ajappang. Atas jatah Seolah Rakyat itu, maka investasi baru yang akan masuk ke Soppeng tahun 2025 ini berada pada kisaran Rp 100 - Rp 150 Miliar.

**7. Rumah Singgah Plus Ambulance di Makassar**  
Program Rumah Singgah di Makassar adalah program janji kampanye SUKSES. Sesuai komitmen keduanya, maka tahun 2025 ini pembangunan rumah singgah akan dihelat. Rumah singgah ini akan memudahkan keluarga dari Soppeng yang sedang berobat di Makassar tetapi tidak punya tempat tinggal. “Rumah singgah juga akan dilengkapi dengan ambulance yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan,” kata Wakil Bupati Selle KS Dalle.

**8. Perbaikan Manajemen dan Layanan RSU La Temmamala**  
Begitu dilantik, SUKSES langsung melakukan pembenahan awal terhadap RSU La Temmamala yang banyak dikeluhkan pelayanannya. Antrian di poliklinik jalan dan di farmasi coba diatasi dengan mengefektifkan sistem informasi dan menambah loket layanan. Meski belum sempurna, tetapi perlahan - lahan menunjukkan perbaikan dari

sebelumnya. Selain itu, Suwardi - Selle terus memperbaiki sistem manajemen keuangan rumah sakit. Dari utang ke pihak ketiga yang sebelumnya mencapai puluhan miliar kini tinggal tak lebih dari Rp 2 miliar.

**9. Mempertahankan UHC Premium**  
UHC (Universal Health Coverage) Premium tetap dipertahankan di Soppeng. Kebijakan yang telah lama ditempuh oleh Soppeng ini dipertahankan Pasangan SUKSES di tahun 2025. Status UHC Premium adalah suatu bentuk jaminan kesehatan yang memberikan akses yang lebih luas dan komprehensif terhadap pelayanan kesehatan, di atas standar jaminan kesehatan dasar yang biasanya disediakan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sejumlah penyakit yang tak ditanggung BPJS dan tidak ada di daerah lain bisa diakses gratis oleh warga Soppeng seperti cuci darah, perawatan jantung dan perawatan jiwa.

**10. WTP Keuangan ke-11 Kalinya**  
Kabupaten Soppeng kembali menorehkan prestasi meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Pencapaian ini merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut, menunjukkan komitmen kuat Kabupaten Soppeng dalam tata kelola keuangan yang baik dan transparan.

Sejatinya, hasil itu adalah upaya luar biasa dari pemerintahan sebelumnya, Andi Kaswadi Razak - Lutfi Halide. Namun, pemeriksaan BPK secara menyeluruh dilakukan pada Bulan April dan Mei 2025. Alhasil, tanpa komitmen kuat dari SUKSES Raihan prestasi itu tak mungkin dicapai. “Saya meminta para pimpinan OPD untuk memenuhi semua permintaan data BPK, tak boleh ada yang meninggalkan daerah dan segera memperbaiki jika ada kekurangan data dan laporan,” kata Suwardi Haseng. (anwar p)

## Warga OKI Temui KDM karena Anak Kena Narkoba, BNNK : Penanganan Penyintas Punya Prosedur Khusus



Kepala BNNK OKI, AKBP H. Gendi Marzanto, SH, MH. (ist)

**OKI, BN -** Viral di media sosial Pasangan suami istri asal Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel) bersama putranya mendarangi Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan.

Maksud kedatangannya jauh-jauh dari Kayu Agung, ternyata meminta tolong Dedi Mulyadi untuk memasukan putranya ke Barak Militer karena putranya yang masih duduk di bangku kelas 10 SMK jurusan teknik perbengkelan itu disebut memiliki kebiasaan menggunakan barang terlarang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) OKI, AKBP H. Gendi Marzanto, SH, MH mengatakan bahwa untuk pengobatan atau rehabilitasi pecandu narkoba tidak perlu jauh jauh keluar Kabupaten OKI dan prosedurnya sangat mudah, tinggal dibawa saja ke

BNNK OKI di Kayuagung

“Kami siap membantu secara gratis. Yang bersangkutan akan kami asesment dulu untuk menentukan tingkat ketergantungannya guna menentukan metode rehabilitasi, apakah rawat jalan atau rawat inap,” ujar Gendi, Jum’at, (30/5).

Menurut Gendi, penanganan narkoba berbeda dengan kenakalan remaja biasa. Karna ada tahap serta perlakuan khusus yang harus diterapkan dalam proses rehabilitasinya.

“Ada proses detoksifikasi, treatment, terapi perorangan, terapi kelompok hingga konseling dan lain lainnya, yang dinilai lebih efektif untuk menangani seseorang yang sudah terkontaminasi oleh zat terlarang,” Jelas dia.

Diakuinya, pendisiplinan anak-anak bermasalah bisa melalui barak militer, tapi untuk anak nakal yang sudah terjerumus memakai narkoba hrs memerlukan treatment khusus.

Gendi menekankan pengguna narkoba yang secara sukarela mendaftarkan untuk rehabilitasi ke Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak akan dipidana, melainkan akan direhabilitasi secara gratis.

“Ini sesuai dengan regulasi, di mana pemakai narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi, bukan lagi hukuman pidana penjara dan biayanya gratis di tanggung negara,” tutup dia.

Gendi mengatakan sudah banyak warga OKI yang dilayani di klinik BNNK OKI. Sepanjang tahun 2024 lalu paparnya terdapat 37 orang penyalahgunaan telah direhabilitasi melalui BNNK OKI dengan rincian 30 orang penyalah guna yang direhabilitasi rawat jalan oleh BNNK OKI dan 7 orang penyalahgunaan yang direhabilitasi rawat inap/ rujukan ke Balai Rehabilitasi BNN.

“BNN memiliki asesor dan konselor yang sudah sertifikasi yg bisa menentukan treatment mana yang tepat untuk diterapkan sesuai tingkat keparahan anak,” ujar Gendi.

Dikatakannya, di bidang pencegahan, BNNK OKI telah melaksanakan advokasi melalui rakor, membangun jejaring, asistensi, intervensi, supervise, monev, bimtek, informasi dan edukasi.

BNNK OKI juga melaksanakan pencegahan melalui program remaja sebaya tahun 2024 yang dilaksanakan di lima sekolah. Yaitu, SMPN 1 Kayuagung, SMPN 5 Kayuagung, SMPN 6 Kayuagung, SMP IT Bina Insani dan MTS Manbaul Ulum Islamiyah.

Lebih lanjut dikatakannya, di bidang pemberdayaan masyarakat, BNNK OKI melaksanakan sosialisasi ke sekolah tingkat SMA dan SMK di OKI, termasuk di desa, dinas, kelurahan dan kecamatan serta perusahaan perkebunan. (Nurtis)

## Isu Seorang Gadis Hamil di Desa Wonosari Karanganyar, Akhirnya Mulai Terkuak



Ilustrasi

**PEKALONGAN, BN -** Beredar berita dimedia online lokal berjudul Desa Wonosari dihebohkan Isu Kehamilan Seorang Gadis, kini menuai titik terang. Pasalnya menurut (K) narasumber yang ditemui media bidik nasional.com yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa ternyata yang menghamili (M) gadis tersebut diduga adalah seorang oknum notaris berinisial EH di wilayah Kajen.

“Saat saya temui langsung pihak keluarga korban di rumahnya. Dari situ, saya mendengar langsung orang tua korban mengatakan bahwa diduga yang menghamili adalah EH seorang oknum Notaris yang ada di wilayah Kajen,” ungkap K narasumber yang minta disamarkan namanya, Selasa 3 Juni 2025.

Ia mengungkapkan bahwa prihatin dengan adanya kejadian tersebut yang diduga dilakukan oleh EH oknum notaris tersebut, apalagi tahu bahwa oknum Notaris tersebut sudah mempunyai seorang istri. “Saya geram ingin membantu pihak keluarga korban agar kasus tersebut dibawa ke jalur hukum saja,” tegasnya.

Masih menurut keterangan K, saya heran keluarga Korban tidak mau menempuh jalur hukum ada apa? Eh ternyata dari keterangan ayah korban sebut saja T karena diiming-imingi bahwa nanti setelah anaknya lahir akan dinikahi resmi dan sekarang sudah melakukan nikah siri. “Waktu hamil usia 4 minggu emang oknum Notaris tersebut diduga sudah nikah siri, emang isi santer di kalangan masyarakat sudah tau,” terangnya.

Joko Kepala Desa Wonosari Karanganyar Kabupaten Pekalongan dihubungi media bidik nasional.com melalui telepon selulernya dan via WhatsApp belum ada respon atau menjawab terkait isu tersebut. (dikin)

## Lantik 33 Fungsional di Lingkup Pemkab Lambar, Sekda Nukman Minta Pejabat Bekerja Sesuai Regulasi



Sekda Nukman saat melantik 33 PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. (taufik)

**LAMPUNG BARAT, BN -** Sekretaris Daerah (Sekda) Nukman melantik 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam jabatan fungsional di Aula Kagungan Setdakab kompleks perkantoran Pemkab setempat, Rabu, 28 /5/2025.

Ke 33 Pejabat fungsional yang dilantik tersebut terdiri dari 12 orang tenaga kesehatan, 3 orang auditor, 1 orang pengawas pemerintahan, 9 orang perencana, 3 orang jabatan penata perizinan dan 5 orang penata kelola penanaman modal.

Dengan adanya pelantikan tersebut, Nukman berharap dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat terhadap pelayanan masyarakat. Nukman mengingatkan kepada 33 tenaga fungsional, sebagai ASN yang baik harus memiliki target kinerja dan capaian. “Itulah sebagai indikator dalam keberhasilan kerja sesuai dengan jabatan masing-masing,” kata Nukman.

Mantan Penjabat Bupati Lampung Barat itu, menekankan kepada 33 tenaga fungsional yang baru saja diantik agar bekerja dengan regulasi yang ada. “Karena Lampung Barat ini sudah terkenal dengan pegawainya yang bekerja sesuai dengan regulasi di buktikan dengan mendapat WTP 15 kali berturut-turut, prestasi itu harus tetap kita jaga,” tutup Nukman. (Taufik)

## Ketua Tim Penggerak PKK Soppeng : Semarak Zulhijjah, Refleksi Pengorbanan

SOPPENG, BN - Bulan zulhijjah kembali menyapa umat islam dengan keutamaan yang luar biasa. Bulan ini identik dengan idul adha atau hari raya kurban dan ibadah haji dimana semua ibadah tersebut membutuhkan pengorbanan didalamnya.

Dalam rangka semarak zulhijjah Muslimah DPD Wahdah Islamiyah Soppeng menyelenggarakan kegiatan yang bertema “Zulhijjah Bulan Taqwa” Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 29/05/2025 di Gedung Serbaguna Lapatau Soppeng yang dihadiri oleh 468 peserta.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Hj. Suarni Suwardi Haseng Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng, dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada Muslimah Wahdah Soppeng atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata kepedulian dan kontribusi organisasi dalam menyemarakan bulan zulhijjah.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa bulan zulhijjah merupakan bulan refleksi pengorbanan, dimana didalam bulan ini terdapat hari-hari terbaik dalam setahun yang harus dimaksimalkan dalam beribadah.



Semarak zulhijjah Muslimah DPD Wahdah Islamiyah Soppeng

“Bulan zulhijjah merupakan bulan refleksi pengorbanan, didalamnya terdapat hari Arafah dan Idul Adha. Melalui kegiatan seperti ini saya percaya akan semakin menumbuhkan semangat keimanan kita untuk belajar banyak tentang pengorbanan,” ujarnya.

Diakhir sambutannya ia menyampaikan harapan agar kegiatan ini tidak hanya seremonial saja, tetapi juga menjadi sarana peningkatan ilmu dan penguatan nilai-nilai tauhid dalam membangun masyarakat dan keluarga yang berakhlak mulia.

“Akhir kata, mari kita jadikan momentum bulan zulhijjah ini sebagai waktu untuk memperbanyak amal, memperkuat persaudaraan, dan menumbuhkan semangat pengorbanan,” tutupnya.

Semarak zulhijjah merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan oleh Muslimah DPD Wahdah Islamiyah Soppeng, sebagai bentuk menyemarakan syiar islam dan menumbuhkan kesadaran kepada muslimah untuk menyambut bulan zulhijjah dengan berbekal ilmu syar’i.

(anwar)



Bos Sritex ...

Dalam kasus tersebut, Kejagung sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka yaitu Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (2005-2022) Iwan Setiawan Lukminto (ISL), kemudian DS selaku pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020 dan ZM selaku Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta tahun 2020. Ketiga tersangka tersebut kini telah ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta.

Sementara itu, terkait ketujuh saksi yang telah dipanggil dan diperiksa, adalah sebagai berikut: 1) HP selaku Kepala Sub Divisi Commercial Banking Bank BPD Jateng, 2) DP selaku Perseroan Pengurus CV Prima Karya, 3) AZ selaku Legal Tim Hadiputranto Hadinoto & Partners tahun 2007 sampai dengan 2017, 4) LW selaku Direktur PT Adikencana Mahkota Buana, 5) APS selaku Direktur PT Yogyakarta Textile, 6) IKL selaku Direktur Utama PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industri, PT Primayuda Mandiri Jaya, 7) AH selaku Direktur PT Perusahaan Dagang.

“Adapun ketujuh orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak

usaha atas nama Tersangka ISL dkk,” ungkap keterangan Kejagung, dikutip Selasa (3/6/2025).

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar menjelaskan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada Sritex dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp 3.588.650.808.028,57 (Rp 3,58 triliun).

Rinciannya Sebagai Berikut: 1) Bank Jateng sebesar Rp 395.663.215.800, 2) Bank BJB, Bank Banten dan Jawa Barat sebesar Rp543.980507.170, 3) Bank DKI sebesar Rp149.785.018,57, 4) Bank Sindikasi yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI dan LPEI jumlah seluruhnya adalah Rp 2,5 triliun.

Selain pemberian kredit terhubung di atas, Sritex juga mendapatkan pemberian kredit dari 20 Bank Swasta. Ada pun kasus pemberian kredit bank tersebut dilakukan secara melawan hukum dan menyebabkan adanya kerugian keuangan negara. Dari laporan keuangan, Sritex telah melaporkan adanya kerugian dengan nilai mencapai US\$1.008.000.000 atau setara dengan Rp 15,65 triliun pada tahun 2021. Padahal sebelumnya di 2020, Sritex masih mencatat keuntungan setara dengan Rp 1,24 triliun.

“Jadi ini ada keganjilan

dalam satu tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan, kemudian tahun berikutnya juga mengalami kerugian yang sangat signifikan,” ucapnya di Kejagung pada Rabu malam, (21/5/2025). “Inilah konsentrasi dari teman-teman penyidik,” imbuhnya.

Kemudian Sritex dan entitas anak perusahaannya memiliki kredit dengan nilai total understanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp 3.588.000.000 dan Rp 650.808.028,57. Utang tersebut kepada beberapa bank pemerintah, baik bank Himbara yaitu himpunan bank milik negara maupun bank milik pemerintah daerah. Bukan hanya itu, Sritex juga mendapatkan pemberian kredit dari 20 bank swasta.

Kemudian dalam pemberian kredit kepada Sritex, ZM selaku Direktur Utama PT Bank DKI dan DS selaku pimpinan divisi korporasi dan komisaris komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBB) telah memberikan kredit secara melawan hukum karena tidak melakukan analisa yang memadai dan mentaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah tidak punya syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian dari lembaga.

Abdul Qohar menjelaskan lembaga pemeringkat Moody’s melaporkan Sritex hanya memperoleh predikat BB- atau memiliki risiko gagal bayar yang lebih

Sambungan hal 1

tinggi. Seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitor yang memiliki peringkat A.

Yang seharusnya dilakukan sebelum diberikan finalis kredit sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan standar operasional prosedur Bank serta Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian.

“Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten dan PT Bank DKI Jakarta terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagai tujuan dari pemberian kredit yaitu untuk modal kerja tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya,” tegas dia.

“Bahwa kredit yang diberikan oleh PT Bank pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk saat ini macet dengan kolima dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilai lebih kecil dari nilai pemberian pinjaman kredit serta tidak dijadikan sebagai jaminan atau agunan,” tuturnya.

(cnbc/red)

Sambungan hal 1

tindakan operasi dilakukan.

Salah satu hal yang disorotinya adalah prosedur pra-operasi, termasuk anjuran puasa dan penggunaan obat-obatan. “Kenapa tidak disuruh puasa dulu, serta masih diberi makan sebelum operasi? Lalu adik korban disuruh beli obat-obatan pada waktu operasi belum lama berlangsung. Itu menjadi tanda tanya besar, apakah SOP-nya seperti itu?” ungkapnya.

Sebelumnya, ibu korban, Anju Vijayanti (49), pada media Bidik Nasional (BN) menyampaikan, bahwa anaknya (Korban) diberi makanan oleh pihak rumah sakit menjelang operasi pada Sabtu pagi, 21 September 2024. “Saya datang jam tujuh ada makanan, saya tanya kok boleh makan ya, “Iya ini disuruh makan’, ya sudah makan,” kata Anju saat dikonfirmasi pada 4 Oktober 2024.

Pernyataan serupa disampaikan adik perempuan korban, KR, yang mempertanyakan apakah makan sebelum operasi merupakan prosedur yang wajar. KR juga mengaku tidak mendapatkan edukasi dari pihak rumah sakit mengenai tahapan pra operasi maupun pasca operasi.

“Saya dan ibu saya saat menjaga kakak tidak pernah mendapat penjelasan oleh dokter maupun suster soal pasca operasi maupun soal penyembuhan pasien,” ujarnya.

Pihak RS Siti Hajar, melalui Kepala Ekalasi Kehumasan dan Promosi Kesehatan (PKRS), dr. Erli Mawar Nur Aini, menyatakan bahwa seluruh tindakan medis telah dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasi (SPO) rumah sakit. “Penanganan yang dilakukan dokter sudah sesuai dengan Standar Prosedur Operasi (SPO) rumah sakit,” tegas dr. Erli saat dikonfirmasi di kantornya baru-baru ihi. (Teddy)

Kepala Riset BRIN Tekankan Kualitas dan Dampak Inovasi Daerah Soppeng dalam Ajang Latemmamala 2025



Sekda Kabupaten Soppeng, Andi Ibrahim Hatta, SH, M.Si.

**SOPPENG, BN** – Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar acara Presentasi dan Wawancara Inovatif Latemmamala Tahun 2025 pada Selasa (27/5/2025), dengan kehadiran virtual Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, Ph.D.

Dalam sambutannya, Mardiyanto menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan dampak inovasi daerah agar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Beliau juga menyoroti perlunya kolaborasi yang kuat antar OPD dan dukungan penuh dari pimpinan daerah dalam mengembangkan inovasi. Partisipasi inovator dari masyarakat desa juga dianggap krusial untuk menciptakan inovasi yang lebih inklusif dan merata. Mardiyanto berharap para nominator dapat terus berinovasi dan menginspirasi lainnya, sehingga Soppeng berpotensi masuk dalam 10 besar inovasi daerah di Indonesia. (anwar p)

Anggaran Disporapar ...

Sambungan hal 1

tetapi juga banyak di lakukan seperti dengan adanya proyek / kegiatan fiktif, penggelapan dan mark- up, maupun penggelembungan harga. Berbagai modus tersebut kerap di temukan dalam pengadaan barang / jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah.

Modus korupsi lainnya yang tak kalah populer adalah laporan fiktif, pemotongan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Seperti halnya di Dinas Pemudah, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jombang, terkait anggaran publikasi patut di sorot, karena diduga ada ketidak beresan, selain itu pada anggaran kegiatan yang lain.

Pada edisi sebelumnya sudah pernah dipublikasikan oleh Bidik Nasional (BN) terkait anggaran publikasi. Semetara itu dari data yang ditemukan ada beberapa anggaran kegiatan lain (selain untuk publikasi) di tahun 2025 ini masih ada anggaran kegiatan lain yang patut disoroti, apakah sudah benar penggunaan anggaran tersebut untuk pembelanjaan nya (LPJ). Seperti anggaran pada pembelanjaan,

1. Belanja pemeliharaan mesin potong rumput dorong senilai Rp 913.000,-
2. Belanja bahan untuk kegiatan kantor lainnya UP. Rp 20.995.225,-
3. Belanja alat pembersih UP. Rp 4.215.500,-
4. Belanja foto copy (Movev destinasi) Rp 56.250,-
5. Belanja sewa elektronik/ elektrik (Olahraga tradisional) Rp 2.500.000,-
6. Belanja bahan bakar pelumas Rp 1.698.00,-
7. Belanja pemeliharaan alat pendingin AC Rp 12.200.000,-
8. Belanja pemeliharaan komputer Rp 16.790.000,-
9. Belanja pemeliharaan printer Rp 13.800.000,-

Dari semua pembelanjaan yang menggunakan uang negara ini apa sudah sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawabannya (LPJ). Saat itu juga Kepala Disporapar Jombang Bambang Nurwijanto ketika di konfirmasi melalui ponselnya maupun Whatssap (WA) nya tidak diangkat, bahkan tidak mau membalasnya.

Jikalau di telisik dan di cermati mulai dari anggaran kegiatan tahun 2025 termasuk untuk kegiatan terkait publikasi di Disporapar Kabupaten Jombang perlu di ungkap karena diduga adanya sejumlah modus dengan kecurangan pada pengelolaan anggaran.

Dugaan adanya modus tersebut bisa di selidiki oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Sementara menurut salah satu tokoh masyarakat Jombang yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan. “Diduga pada anggaran kegiatan di Disporapar Jombang, ada modus adanya kecurangan, selain itu ada manipulasi di dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk ada indikasi penggelembungan anggaran. Jadi seharusnya patut diusut,” ujarnya. (Tok)

Proyek Rabat ...

Sambungan hal 2

diduga bahwa hasil yang tidak maksimal tersebut akibat lemahnya dari pengawasan dalam proyek tersebut.

Tampak dalam Papan Nama Proyek, bahwa pihak Pelaksana adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa tentunya persiapan pra pelaksanaan harus maksimal karena ini menyangkut hajat orang banyak.

Jalan adalah sarana bagi masyarakat dalam beraktivitas, namun jika dibangun kemudian hasilnya tidak maksimal tentunya berakibat buruk, dana anggaran Negara terbuang sia-sia Salah satu masyarakat yang enggan namanya di sebut saat di konfirmasi awak media menuturkan pembangunan jalan rabat beton ini baru beberapa bulan dikerjakan dan sudah mengelupas di beberapa titik

Kami dibuat geram. Pasalnya jalanan yang baru dikerjakan mengelupas dan retak kondisi ini membuat warga resah karena harus merasakan dampak yang ditimbulkan. gerutunya.

Dengan adanya pemberitaan ini baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Inspektorat dan pihak (APH) Aparat penegak hukum Jombang untuk turun langsung kelapangan mengkroscek bangunan jalan rabat beton di Dusun tersebut. (Tok)

Gubernur Jawa Barat ...

Sambungan hal 12

begitu mencintai tanah Bogor sebagai tanah pusaka. Bogor adalah pusat peradaban Sunda yang sebenarnya, kolonial Belanda menjadikan Bogor sebagai pusat peradaban negara.

“Selamat Hari Jadi Bogor, kita maju terus membangun Kabupaten Bogor yang istimewa, kita kembalikan Bogor kepada jati dirinya sebagai tanah pusaka,” ungkap KDM.

KDM juga menuturkan, tanah ini tanah pusaka, kita kembalikan seluruh arsitekturnya kepada arsitektur kita, buat cerminan kerajaan Sunda, agar orang Bogor merasa inilah Bogor sebagai tanah pusaka, tanah yang aku cintai.

“Kalau ingin jadi pemimpin hebat cintai Bogor dengan sepenuh hati, di awal jabatan saya sebagai Gubernur, saya langsung bongkar bangunan yang merusak peradaban Bogor,” tandas KDM. KDM menambahkan, seorang pemimpin ditakdirkan berdiri di atas badai tidak penting elektabilitas tapi lebih penting berani menerjang badai, dan meletakan kerangka besar bagi sendi-sendiri pembangunan, “Yuk kita bongkar bangunan yang menyalahi aturan jangan pernah takut, Presiden Prabowo sudah perintahkan tindak semua yang melanggar aturan,” pungkas KDM.

Hadir pada upacara tersebut, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor, Anggota DPR RI, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, para mantan Pj. Bupati Bogor, Bupati Bogor periode 2015-2018, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, Komandan Lanud ATS, jajaran wakil dan anggota DPRD Kabupaten Bogor, jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda. (eml)

Direktur PDAM ...

Sambungan hal 8

bocor. Namun tim sudah turun kelapangan untuk memantau memperbaiki pipa yang bocor,” kata Bachtiar.

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, banyak keluhan yang disampaikan oleh warga kepada dirinya terkait persoalan distribusi air PDAM yang tidak mengalir selama berhari-hari serta bekas galian pipa bocor yang merusak jalan raya.

Wabup menekankan, agar PDAM Bone memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat Bone. Sesuai arahan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman bahwa kita semua harus berbenah dan bekerja yang lebih baik.

“Saya berharap Direktur PDAM Wae Manurung dapat memberikan perubahan dan inovasi demi pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan PDAM,” harap A.Akmal.

Menurut A.Akmal, Pemda tentunya menaruh perhatian serius terhadap layanan air bersih yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.Oleh sebab itu, Pemda Bone berharap, agar layanan air bersih dapat ditingkatkan dan PDAM mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat serta daerah Bone.

PDAM harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi daerah. “Saya berharap direktur PDAM mampu memimpin perusahaan menjadi lebih baik dan memberikan layanan yang optimal,” tutup A.Akmal. (edys)



# Pemkot Bandung Buktikan Mampu Raih WTP Berulang Kali!

**BANDUNG, BN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan kali kelima Kota Bandung setelah dua tahun kebelakang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).**

**LAPORAN** Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024 secara resmi diterima oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dan Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Senin, 26 Mei 2025 lalu.

Farhan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandung yang telah bekerja keras dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, Opini WTP ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah di Pemkot Bandung. Didukung oleh pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa 27 Mei 2025.

Ia mengatakan, Opini WTP ini menjadi motivasi bagi Pemkot Bandung untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. “Kami sangat bersyukur bahwa dalam tiga bulan, betul-betul kerja keras memastikan laporan kita sampaikan ini memenuhi berbagai macam persyaratan dan ketentuan sehingga mendapat WTP,” tuturnya.

Atas hal tersebut, menjadi motivasi bagi jajaran Pemkot Bandung dalam meningkatkan akan inovasi dalam reformasi birokrasi, “Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam reformasi birokrasi, memperbaiki sistem, memperkuat integritas dan tentu saja menghadirkan layanan publik yang prima dengan anggaran yang efisien dan tepat sasaran,” tuturnya.

Menurutnya, ini sebagai bukti bahwa seluruh jajaran

Pemkot Bandung berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik. “Pencapaian WTP ini juga kami persembahkan bagi seluruh masyarakat Kota Bandung. Ini adalah bukti bahwa setiap rupiah dari pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan secara transparan,” tuturnya.

“Kepercayaan ini akan terus kami jaga dengan memberikan pelayanan terbaik dan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh warga Bandung,” imbuh Farhan.

Perlu diketahui, Pemkot Bandung telah melakukan beberapa upaya perbaikan guna menindaklanjuti rekomendasi BPK atas empat permasalahan yang menjadi pengecualian pada periode sebelumnya yaitu :

1. Aset Tetap sebesar Rp 551 miliar belum dapat dipastikan status dan keberadaannya.

2. Sebanyak 1.141 bidang tanah yang disewakan luasnya lebih besar dari luas tanah yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah (BMD) dengan selisih sebesar 139.465 meter persegi yang belum dapat dijelaskan selisihnya.

3. Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada 14 perumahan sebesar Rp187,99 miliar dalam Neraca Pemerintah Kota Bandung sudah beralih fungsi dan tidak dikuasai oleh Pemkot Bandung.

4. Pemkot Bandung belum menyajikan Aset PSU pada 95 perumahan yang telah diserahkan sebesar Rp4 triliun.

Pemkot Bandung telah menindaklanjuti permasalahan yang menjadi pengecualian pada periode sebelumnya dengan:

1. Melakukan inventarisasi Aset Tetap secara Sensus untuk penelusuran atas Aset Tetap sebesar Rp551,72



Walikota Bandung, M. Farhan beserta Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Senin, 26 Mei 2025. (Photo: Istimewa)

miliar sehingga sebesar Rp498,98 miliar diantaranya telah dapat diketahui status dan keberadaannya. Sisanya sebesar Rp 52,74 miliar berupa aset rusak berat, aset hilang dan aset yang telah dihancurkan sedang dalam proses verifikasi Inspektorat Kota Bandung.

2. Memverifikasi 1.141 bidang tanah sehingga menemukan 764 objek tanah sewa seluas 289 ribu meter persegi yang belum tercatat pada Daftar BMD sebesar Rp222.407.318.814 dan telah menyajikannya pada Neraca per 31 Desember 2024

3. Melakukan pengama-

nan PSU atas delapan perumahan, sedangkan atas enam perumahan lainnya merupakan Aset PSU yang terdampak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan pihak yang ditunjuk KCIC menyatakan bahwa atas Aset PSU tersebut akan direlokasi/ diganti ke lokasi lainnya sesuai Berita Acara Kesepakatan Fasilitas Sosial (Fasos) Fasilitas Umum (Fasum) Terdampak Proyek KCIC

4. Menyajikan Aset PSU yang telah diserahkan oleh pengembang pada 95 perumahan sebesar Rp. 7 trilyun pada Neraca per 31

Desember 2024.

## DPRD Apresiasi Pemkot Raih WTP

Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Senin, 26 Mei 2025.

Asep Mulyadi pada kesempatan itu, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Bandung atas raihan opini WTP itu. Prestasi itu cukup mele-

gakan setelah dua tahun terakhir Pemkot Bandung menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Alhamdulillah hasil laporan ini adalah WTP. Ini tentunya jadi modal dasar untuk perbaikan terus ke depan. Walaupun tadi ada beberapa catatan juga terkait beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dalam 60 hari ke depan,” tutur pria yang biasa disapa Kang Asmul itu.

Ia meminta Pemkot Bandung mempertahankan ketertiban laporan pencatatan aset dan keuangan di masa mendatang dengan menyiapkan matang nya perencanaan, pelaksanaan, dan beberapa pencatatan aset yang harus jauh lebih tertib dan lebih sempurna. “Bahkan kalau bisa semua harus disiapkan agar kita bisa lebih terkontrol, lebih terantau, begitu ya,” ujar Kang Asmul.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung, Rendiana Awangga, menyampaikan apresiasi atas capaian ini, yang dinilai sebagai hasil nyata dari kolaborasi politik yang sehat antara legislatif, eksekutif, dan seluruh elemen pengawasan publik “Opini WTP dari BPK adalah pengakuan bahwa

keuangan daerah kita dikelola dengan akuntabel dan transparan. Ini bukan sekadar angka, tetapi simbol kepercayaan publik yang sedang kita bangun kembali bersama,” ujar Awangga.

Menurutnya, capaian ini menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi dan pembenahan sistem penganggaran yang dilakukan sejak awal pemerintahan Wali Kota Farhan telah berjalan di jalur yang benar.

“Kami di DPRD Kota Bandung pun berkomitmen untuk terus menjaga fungsi pengawasan dengan cara yang konstruktif. Politik tidak cukup dengan kritik, harus ada kontribusi dalam solusi. Ini yang selalu kami bawa dalam setiap rapat anggaran dan pengawasan,” tambahnya.

Sebagai partai pendukung utama Wali Kota Bandung, Partai NasDem Kota Bandung juga melihat keberhasilan ini sebagai pijakan moral dan politik untuk terus mendorong pemerintahan yang lebih bersih dan responsif.

“Capaian ini bukan akhir, tapi awal untuk kerja yang lebih besar. WTP harus menjadi standar, bukan sekadar prestasi insidental,” tegas Awangga.

(Adv)

## BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Serahkan LHP LKPD Tahun Anggaran 2024

**BANDUNG, BN -** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat. Dari 27 pemerintah kota dan kabupaten, yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 19 wilayah.

Kemudian opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH) sebanyak tiga wilayah, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis. WTP dengan Penekanan Suatu Hal dan Hal Lain (WTP PSHHL) satu wilayah Kota Bekasi, WTP dengan Paragraf Hal Lain (WTP PHL) dua wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bandung, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) satu wilayah Kabupaten Pangandaran, dan WDP PSH satu daerah Kabupaten Kuningan.

Sementara 19 daerah WTP yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Garut.

Kepala BPK Perwakilan Jabar, Eydu Oktain Panjaitan menuturkan, pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberi opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. “Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,” ucapnya, Selasa 27 Mei 2025.

Tujuan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK meliputi penilaian kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

BPK sendiri melakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap laporan keuangan Pemkot Bandung sejak akhir Maret hingga April 2024. Sedangkan, penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam waktu 2 bulan setelah laporan keuangan yang belum diaudit diterima oleh BPK.

Bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memang selama dua tahun menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan keuangan, namun demikian Pemkot Bandung akhirnya mencatatkan prestasi membanggakan, meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Capaian ini bukan sekadar gelar administratif, tetapi simbol pulihnya kepercayaan terhadap tata kelola anggaran yang selama ini terus diperbaiki dengan penuh kerja keras dan komitmen.

Prestasi ini terasa semakin istimewa karena Kota Bandung sebelumnya sempat dua tahun berturut-turut hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), indikasi adanya sejumlah kelemahan dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan daerah. Kini, dengan opini tertinggi yang kembali diraih, Bandung seolah keluar dari masa pemulihan kredibilitas dan memasuki babak baru tata kelola keuangan yang lebih sehat dan akuntabel.

Penyerahan secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2024 oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi ini bukan sekadar formalitas, tetapi simbol konkret Bandung kembali dipercaya sebagai kota dengan tata kelola anggaran yang bersih dan terukur.

(Adv)

## UPT Pelabuhan Perikanan Puger Bersama Mahasiswa Unej dan Muspika Bersih-bersih Lingkungan Pelabuhan



Kegiatan UPT Pelabuhan Perikanan Puger bekerjasama dengan mahasiswa Universitas Jember (UNEJ) dan Muspika Puger saat bersih-bersih kawasan pelabuhan perikanan Puger. (dkp)

**JEMBER, BN -** Kawasan Puger merupakan kawasan padat pemukiman dan penduduk. Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terletak diapit oleh dua desa yakni Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, pada tahun 2024 dua desa tersebut memiliki jumlah penduduk sebesar 28.285 jiwa. Sehingga isu tentang kebersihan dan kesehatan masyarakat cukup menjadi perhatian, terlebih oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Jember (UNEJ).

Pada Sabtu tanggal 17 Mei 2025 UPT Pelabuhan Perikanan Puger bekerjasama dengan mahasiswa Universitas Jember (UNEJ) mengadakan kegiatan bersih-bersih kawasan pelabuhan perikanan. kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan magang praktikum

lapang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UNEJ dengan tema “Peningkatan Kapasitas Mahasiswa Dalam Advokasi Kesehatan Melalui Komunikasi Efektif, Desain Strategis, dan Simulasi Peran Pada Komunitas Pertanian dan Perkebunan” di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.

Selain diikuti oleh staf Pelabuhan Perikanan Puger dan mahasiswa FKM UNEJ kegiatan ini juga melibatkan Muspika Kecamatan Puger, Polsek Puger, Koramil Puger, Satpolairud Jember, Pos TNI AL Puger serta masyarakat dan pedagang di kawasan Pelabuhan Perikanan Puger.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi advokasi kepada masyarakat dan memberi edukasi agar mereka senantiasa meningkatkan kesadaran akan pentingnya selalu menjaga kebersihan linku-

ngan, baik di rumah maupun di wilayah tempat mereka bekerja. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat diharap bisa turut andil dalam menjaga kawasan mereka, sehingga dengan kawasan yang bersih nantinya akan tercipta kehidupan masyarakat yang sehat. (dkp/adv)



## Gubernur Jawa Barat Pimpin Upacara Peringatan HJB Ke-543, KDM: Mari Kembalikan Bogor Sebagai Tanah Pusaka



Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM). (eml)

**BOGOR, BN-**Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) memimpin upacara peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543, di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, KDM berpesan, pada momentum HJB ke-543 ini mari kembalikan Bogor kepada jati dirinya sebagai tanah pusaka yang dicintai. Selasa (3/6/2025).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan, kemuliaan baginya bisa hadir di Bogor sebagai orang yang